



**FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESETARAAN
GENDER DI FILIPINA**

*(FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF GENDER EQUALITY IN
PHILLIPINES)*

SKRIPSI

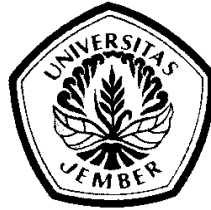
Oleh:

CAMELLIA NADHIFATUL ABROR

NIM 140910101007

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESETARAAN
GENDER DI FILIPINA**

*(FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF GENDER EQUALITY IN
PHILLIPINES)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

CAMELLIA NADHIFATUL ABROR

NIM 140910101007

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

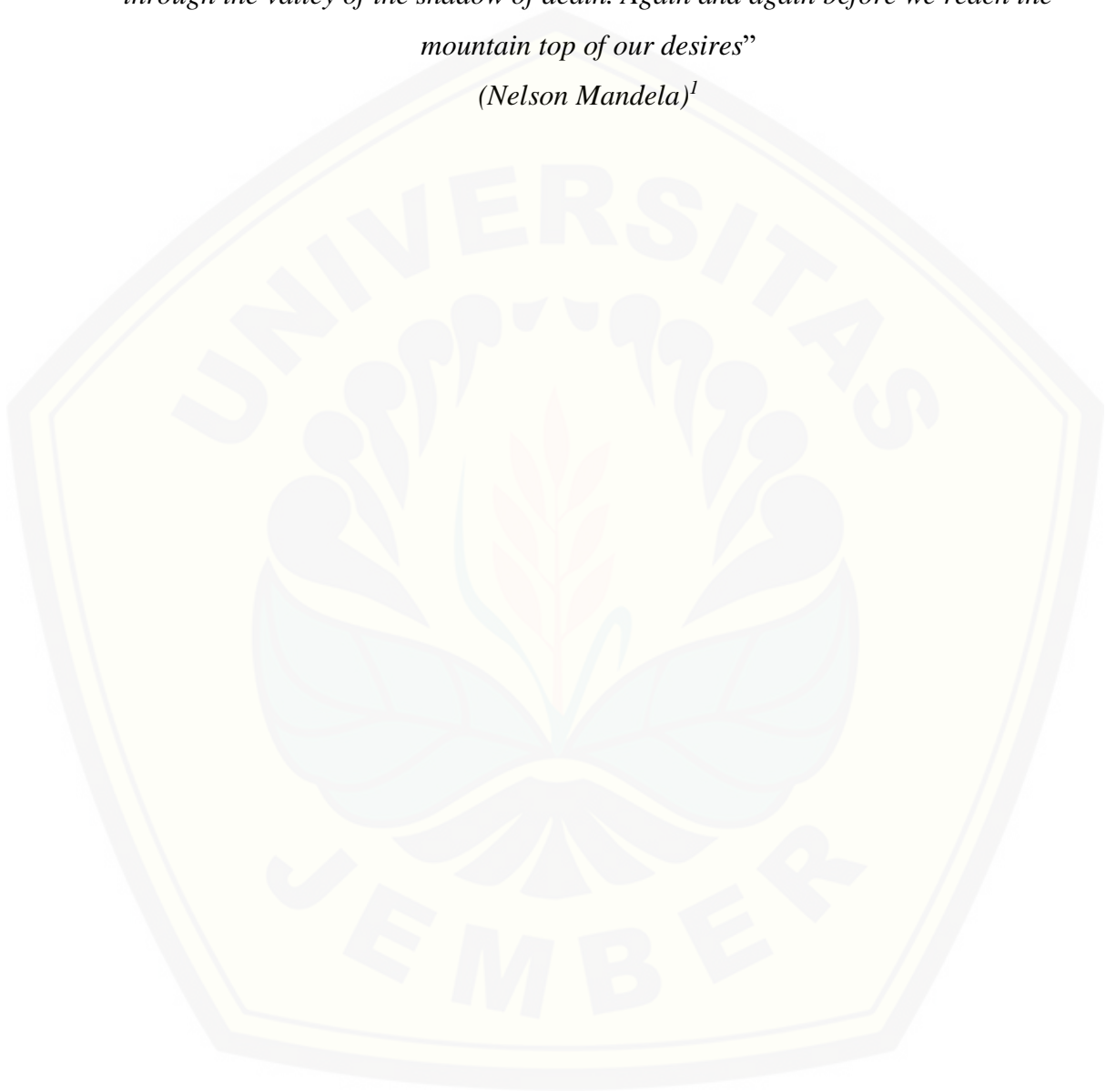
Dengan mengharap ridho dan karunia dari Allah swt, dengan ikhlas kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Syaifudin, Ibunda Murtiningsih, dan adik saya Abdi Fananni Ashidiqi yang saya sayangi dan saya banggakan;
2. Ibu Siti Zainab serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah senantiasa membagikan ilmunya dan memberikan bimbingan selama ini;
4. Almamater tercinta Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Tere is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires”

(Nelson Mandela)¹



¹Mandela, N. 1953. Presidential address to ANC conference .<https://www.theguardian.com/world/2013/dec/06/nelson-mandela-life-quotes>. Diakses pada 25 Mei 2018.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Camellia Nadhifatul Abror

NIM : 140910101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender di Filipina” adalah benar-benar karya tulis sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan untuk institusi lain, dan bukanlah karya hasil menjiplak. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2018

Yang menyatakan:

Camellia Nadhifatul Abror

NIM 140910101007

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESETARAAN
GENDER DI FILIPINA**

*(FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF GENDER EQUALITY IN
PHILLIPINES)*

Oleh:

Camellia Nadhifatul Abror

NIM. 140910101007

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing II : Drs. Djoko Susilo M.Si

PENGESAHAN



RINGKASAN

Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender di Filipina;

Camellia Nadhifatul Abror; 140910101007; 2018; 102Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional ; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Gender juga relevan bagi kerja gerakan masyarakat sipil. Gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan, karena terkonstruksi secara sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan, agama, etnik, budaya, ras, kelas/kasta dan seterusnya (Eviota, 1994). Di Asia Tenggara isu gender kurang terangkat karena kebanyakan negara-negara di kawasan ini menganut sistem patriarki. Namun berbeda dengan Filipina, pada tahun 2016 Filipina berhasil menempati peringkat 7 dunia untuk urusan kesetaraan gender yang dikeluarkan *World Economic Forum* (WEF), tentu hal ini berbanding terbalik dengan negara-negara yang berada satu kawasan dengan Filipina, selain itu dimasa lalu Filipina banyak mengalami masalah diskriminasi perempuan, diantaranya perdagangan seksual, pernikahan dini, dan tidak adanya akses bercerai untuk perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga. Maka dari itu, penulis ingin mendeskripsikan faktor-faktor dari keberhasilan pembangunan kesetaraan gender di Filipina.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature research*, dimana untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari media cetak, situs internet atau website resmi, buku cetak maupun elektronik (e-book). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data-data tersebut dianalisis, kemudian di deskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh terkait permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kesetaraan gender di Filipina dikarenakan beberapa faktor, yakni (1) Kapasitas teknis dalam mewujudkan kesetaraan (2) Adanya struktur dan kelembagaan yang

tertata baik (3) Kepemilikan sumber daya (4) Akuntabilitas dan sistem pengawasan.

Keberhasilan tersebut ditunjukkan oleh *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2016 dengan Filipina berhasil menempati peringkat ke 7 dan tertinggi di Asia. Hal ini merupakan wujud nyata dari pemerintah maupun masyarakat Filipina yang saling memberi timbal balik positif demi terwujudnya kesetaraan. Pada akhirnya perempuan Filipina mampu menunjukkan eksistensinya dan mampu bersaing dengan laki-laki, porsi perempuan disini bukan untuk menggantikan kedudukan laki-laki, tetapi lebih kepada diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki baik itu dalam hal pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayahnya-Nya serta sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW atas petunjuk kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Faktor-Faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender di Filipina”. Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasihat, dan saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tidak menghilangkan rasa hormat yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardianto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan saran, nasihat dan perhatiannya selama penulis menjadi mahasiswa bimbingannya;
4. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan ilmunya baik berupa saran, nasihat-nasihat dan juga waktunya yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Terimakasih untuk Bapak Panuluh selaku operator Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang selalu membantu memberikan informasi;
7. Terima kasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat;

8. Terimakasih untuk adik saya Abdi Fananni Ashidiqi yang selalu mendukung dalam hal apapun;
9. Terimakasih untuk kakak sepupu saya Ulva Sururoh yang selalu mendengarkan keluhan dan memberikan semangat yang tiada henti;
10. Muhammad Krisna Surya Wijayayang senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat seperjuangan: Leni Rosapriilya Putri dan Dea Prastiwi W yang telah menjadi tempat untuk berbagi;
12. Seluruh keluarga besar Ilmu Hubungan Internasional khususnya Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2014 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam mencari ilmu;

Akhir kata tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.2 batasan Waktu.....	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Landasan konseptual.....	8
1.5.1 Konsep Pembangunan Gender (Berdasarkan Tujuan Kelima SDGs).....	8
1.5.2 Konsep Pembangunan Gender (Berdasarkan Ketentuan WEF)13	13
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	17
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	18
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB 2. GAMBARAN UMUM KEADAAN GENDER DI FILIPINA	21

2.1 Sejarah Gerakan Gender di Filipina	21
2.2 Masalah Gender yang Dihadapi Filipina.....	25
2.2.1 Faktor Agama	25
2.2.2 Faktor Budaya.....	27
2.2.3 Keterbatasan Akses	29
2.3 Awal Keterlibatan Perempuan dalam Politik.....	30
2.4 Perempuan Filipina Pada Masa Pemerintahan Presiden Ramos (1992) sampai Sekarang.....	37
BAB 3. PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DI FILIPINA	42
3.1 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	47
3.2 Penetapan Hak Pembangunan Sosial Perempuan.....	56
3.3 Gender dalam Keamanan, Keadilan dan Perdamaian.....	58
3.4 Gender dalam Lingkungan Hidup	61
3.5 Pemerintah yang Responsif terhadap Gender.....	63
BAB 4. FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DI FILIPINA.....	67
4.1 Kapasitas Teknis untuk Mewujudkan Kesetaraan	67
4.2 Adanya Struktur dan Proses Kelembagaan yang Tertata Baik	71
4.2.1 Sejarah Terbentuknya GABRIELA	71
4.2.2 Strategi Gerakan GABRIELA	73
4.2.3 GABRIELA dan <i>people power</i>	76
4.2.4 Transformasi Gerakan GABRIELA.....	77
4.2.5 Struktur GABRIELA	78
4.3 Kepemilikan Sumber Daya	79
4.3.1 Kesempatan dan Partisipasi Ekonomi	84
4.3.2 Pendidikan	85
4.3.3 Pemberdayaan Politik.....	86
4.3.4 Kesehatan dan Kemampuan Bertahan Hidup.....	88
4.4 Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan	89
BAB 5 KESIMPULAN	94

DAFTAR PUSTAKA..... 96

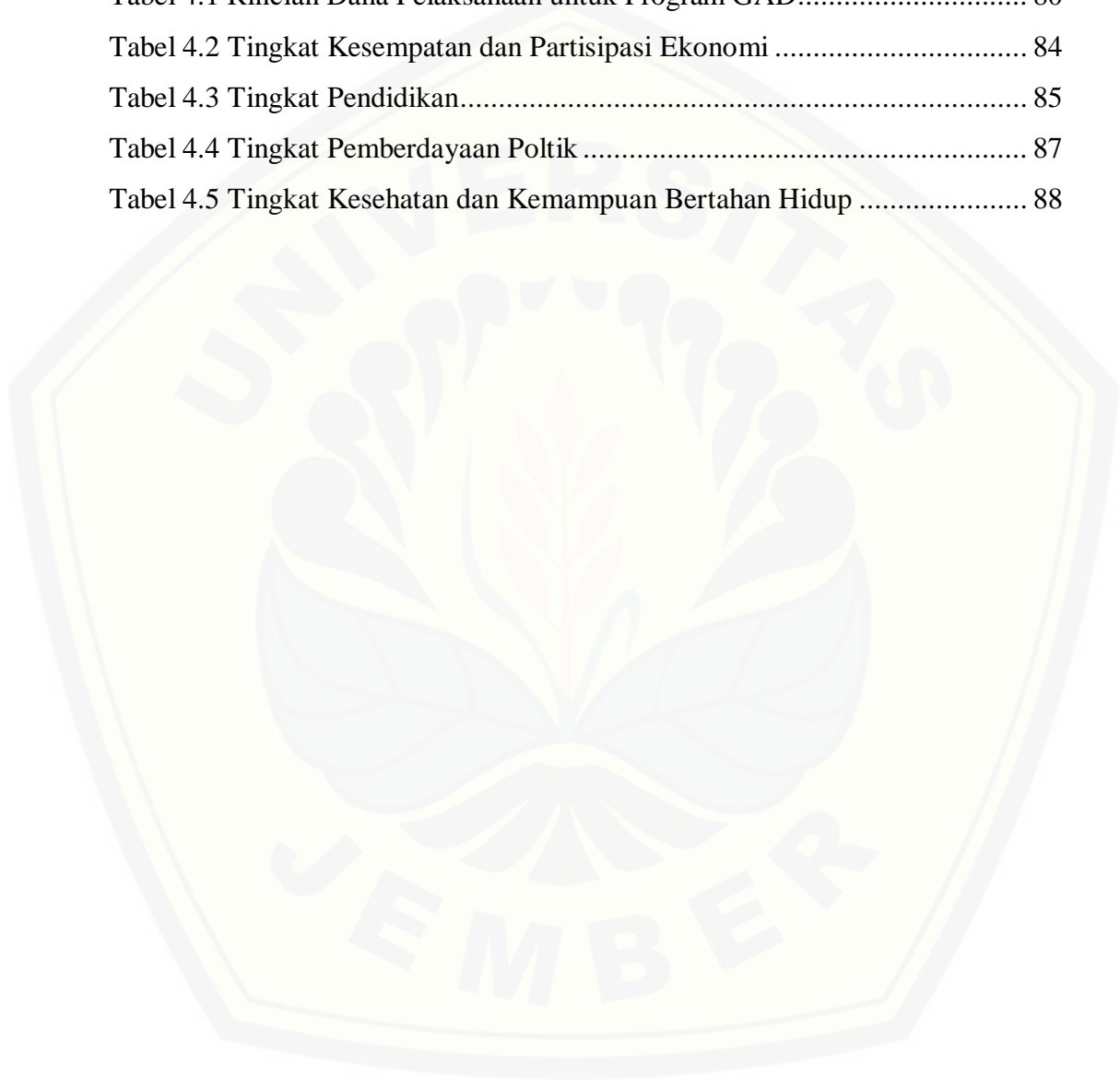


DAFTAR SINGKATAN

AFF	: <i>Asociacion Feminista Filipina</i>
BPfA	: <i>Beijing Platform for Action</i>
CEDAW	: <i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CIDA	: <i>Canadian International Development Agency</i>
CPP	: <i>Communist Party of the Phillipines</i>
DOLE	: <i>Departement of Labor and Employment</i>
GABRIELA	: <i>General Assembly Binding Women for Reform, Integrity, Equality, Leadership, and Action</i>
GAD	: <i>Gender and Development</i>
GREAT Women	: <i>Gender-Responsive Economic Actions for the Transformation of Women</i>
NCRFW	: <i>National Commission on the Role of Filipino Women</i>
NDF	: <i>National Democratic Front</i>
PPGD	: <i>Phillipine Plan for Gender-Responsive Development</i>
PDPW	: <i>Phillipine Development Plan of Women</i>
PCW	: <i>Phillipine Commission on Women</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programs</i>
WEF	: <i>World Ecoomic Forum</i>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kemenangan Legislatif 1989-Juni 1992.....	35
Tabel 2.2 Persentase Pejabat yang Dipilih di Filipina	37
Tabel 4.1 Rincian Dana Pelaksanaan untuk Program GAD.....	80
Tabel 4.2 Tingkat Kesempatan dan Partisipasi Ekonomi	84
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan.....	85
Tabel 4.4 Tingkat Pemberdayaan Poltik	87
Tabel 4.5 Tingkat Kesehatan dan Kemampuan Bertahan Hidup	88



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gender adalah variabel kompleks yang merupakan bagian dari konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik. Gender juga relevan bagi kerja gerakan masyarakat sipil. Gender adalah perbedaan yang dikonstruksi secara sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Karena terkonstruksi secara sosial, perbedaan gender tergantung pada usia, status perkawinan, agama, etnik, budaya, ras, kelas/kasta dan seterusnya (Eviota, 1994).

Pada awalnya gender dengan jenis kelamin dianggap memiliki arti yang sama. Padahal jenis kelamin itu sifatnya tetap dan tidak dapat diubah, sementara gender bisa berubah sesuai dengan lingkungannya. Konstruksi bahwa perempuan tidak bisa berbuat apa-apa, lemah, mudah putus asa, emosional, dan mudah tersinggung membuat perempuan banyak mengalami diskriminasi atas hak yang harus diterimanya. Banyak juga kejahatan yang dilakukan kepada perempuan seperti pelecehan seksual, upah kerja yang lebih rendah dari laki-laki, serta perlakuan buruk dalam dunia kerja. Berbagai masalah terhadap perempuan ini tidak hanya dialami oleh satu negara saja (misalnya Indonesia) tetapi juga hampir dialami oleh kebanyakan negara-negara di dunia. Maka dari itu, PBB selaku pemersatu negara di dunia, membuat entitas bagian khusus untuk hak perempuan dan anak-anak perempuan yang diberi nama *UN Women*.

UN Women dibentuk oleh Resolusi Majelis Umum nomor 64/289, dan mulai dioperasionalkan semenjak Januari 2011. Pembentukan *UN Women* merupakan salah satu agenda reformasi PBB dan memiliki gabungan mandat dari berbagai bagian sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang terdiri dari *Division for the Advancement of Women (DAW)*, *International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)*, *Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)*, *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* (Kalla, 2015).

Selain dari gabungan mandat di atas, *UN Women* juga harus memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas PBB dalam kinerjanya pada masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari dibentuknya *UN Women* adalah untuk meningkatkan, bukan menggantikan, upaya yang dilakukan oleh sistem PBB lainnya, seperti UNICEF, UNDP dan UNFPA, yang semuanya bekerja secara berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di area keahlian masing-masing (UN Women, 2017).

Salah satu dampak dari adanya ketidakadilan sistem ekonomi dan politik di sebuah negara ialah semakin meluasnya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginal termasuk perempuan didalamnya. Kultur patriarki yang telah begitu mengendap dalam seluruh spektrum kehidupan seolah memantapkan ketidakadilan sistem ekonomi dan politik yang melemahkan posisi perempuan. Di Asia Tenggara, dengan memanfaatkan ‘nilai ketimuran’ patriarki secara leluasa melampiaskan hasrat menyingkirkan perempuan dengan membangun dikotomi antara ranah publik dan privat. Perempuan semakin termarginal dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bentuknya adalah peminggiran peran perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan publik. Isu gender selalu menarik untuk diteliti karena menyangkut hak asasi manusia. Banyaknya diskriminasi terhadap perempuan menimbulkan gerakan-gerakan sosial yang mengatas namakan feminis untuk menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Tidak terkecuali di Filipina, pada awalnya situasi gender di Filipina ditandai dengan kontradiksi yang tajam.

Salah satu yang fenomena krusial yang terjadi di Filipina yakni perdagangan seksual. Pada tahun 1998 Filipina mengalami krisis ekonomi yang membuat negara ini menghadapi berbagai tekanan dari masyarakat karena melonjaknya harga kebutuhan pokok. Pemerintah memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap banyak pekerja karena tidak sanggup membayar upah. Menurut IBON Foundation, dalam sepuluh bulan pertama pada tahun 1998 saja, 2.495 perusahaan ditutup atau terpaksa melakukan penghematan yang berpengaruh terhadap sekitar 126.608 pekerja. Seratus ribu orang kehilangan

pekerjaan mereka. Statistik resmi menunjukkan 4,28 juta warga Filipina menganggur. Upah tetap tidak mencukupi karena harga komoditas dan jasa dasar terus meningkat (Monte, 1999).

Hal ini membuat pemerintah Filipina terpaksa mengirim pekerja perempuan keluar negeri untuk membantu meminimalkan krisis yang terjadi. Dari sinilah diskriminasi terhadap perempuan itu dimulai, para pekerja perempuan yang dikirim keluar negeri seperti Jepang, Jerman, dan lain-lain, kebanyakan dijadikan pekerja seks komersial. Beberapa dari perempuan tersebut sempat mencoba melarikan diri akan tetapi mereka yang puang ke Filipina dikembalikan ke asal negara mereka bekerja. Pemerintah seakan tidak memikirkan hak pekerja perempuan tersebut, bahkan pemerintah terkesan membiarkan pekerjajanya menjadi pekerja seks komersial.

Selain diskriminasi diatas, didalam negeri sendiri pemerintah Filipina mengalami masalah yang juga serius yakni pernikahan yang melibatkan perempuan di bawah umur atau disebut dengan *child brides*. Mereka biasanya merupakan perempuan yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 18 tahun, yang masa depannya terganggu dengan pengenalan dini ke dalam dunia pernikahan, tanggung jawab sebagai seorang ibu dan rumah tangga (Jimenez-David, 2013). Pernikahan terjadi seringkali atas rasa keterpaksaan atau tanpa persetujuan dari pengantin perempuan.

Studi terbaru di Filipina menemukan bahwa 14% perempuan berusia 20-24 melaporkan bahwa mereka telah menikah sebelum usia 18. Hal ini diperkuat dengan statistik yang dikumpulkan oleh Badan Koordinasi Statistik Nasional menunjukkan bahwa untuk tahun 2011, total 58.320 perempuan (12,2 persen) menikah di bawah usia 20 tahun. Sebaliknya, hanya 12.882 (2,7 persen) remaja laki-laki menjadi calon pengantin pria (Miller-Mullo 2012). Data-data ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan yang harus dialami perempuan dan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi.

Praktek pernikahan di bawah umur marak terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya pandangan bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat

menjadikan anak perempuan tidak terlalu dihargai dibandingkan dengan anak laki-laki, perempuan dilihat sebagai beban keluarga mereka. Menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda dapat dilihat sebagai cara untuk meringankan kesulitan ekonomi dengan mentransfer ‘beban’ ini kepada keluarga suaminya (Brides, 2012).

Kedua, ketika kemiskinan akut terjadi, keluarga dan kadang-kadang anak perempuan itu sendiri percaya bahwa pernikahan akan menjadi solusi untuk mengamankan masa depan mereka. Menikahkan anak perempuan mereka memungkinkan orang tua untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Ditambah lagi suatu keluarga yang menganut sistem patriarki akan lebih memilih untuk berinvestasi dalam pendidikan anak laki-laki mereka yang dianggap ‘lebih berharga’. Sehingga perempuan yang terlibat pada pernikahan di bawah umur umumnya tidak memiliki jenjang pendidikan atau putus sekolah. Dalam beberapa kasus pernikahan di bawah umur terjadi untuk membayar hutang, menyelesaikan sengketa, atau untuk membentuk aliansi sosial ekonomi dan politik (Brides 2012).

Alasan-alasan lainnya seperti menjaga kehormatan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, bahkan untuk mengontrol tingkah laku dan seksualitas perempuan, juga menjadi faktor pendorong maraknya pernikahan di bawah umur tersebut. Oleh sebab itu mayoritas pernikahan dibawah umur berlangsung di daerah pedesaan yang miskin dan jauh dari akses informasi. Adat istiadat yang tidak memberikan peluang kepada wanita untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya juga menjadi faktor yang dominan. Mereka terbiasa untuk tunduk terhadap apa yang orang lain perintahkan kepadanya. Perempuan yang baik ialah perempuan yang tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut, dan penurut, sehingga perempuan menjadi enggan atau takut untuk melakukan perubahan (Miller-Mullo 2012).

Perempuan di Filipina semakin dirugikan dengan adanya keterbatasan pada hak mereka untuk bercerai. Filipina yang didominasi oleh kepercayaan Katolik Roma, merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak mengizinkan perceraian. Pembatalan pernikahan hanya dapat terjadi apabila kriteria-kriteria tertentu terpenuhi, dengan diimplementasikannya hukum khusus yang

memungkinkan untuk pembatalan dalam situasi kawin paksa, sehingga apabila anak perempuan tersebut tidak mampu menanggung beban rumah tangga dan mendapatkan kekerasan fisik dari suami ataupun keluarganya, mereka tidak bisa melakukan pembatalan pernikahan atau perceraian.

Para perempuan ini mungkin memiliki kesulitan mengakses perlindungan hukum melalui otoritas lokal atau sistem peradilan, khususnya di kota kecil atau daerah pedesaan. Kelompok-kelompok pendukung perempuan lokal mencatat bahwa di daerah tersebut, pelaku pernikahan di bawah umur kadang-kadang menggunakan hubungan pribadi dengan pemerintah setempat untuk menghindari penuntutan. Adanya laporan yang menjelaskan bahwa perempuan yang berusaha untuk mengajukan pengaduan melalui polisi diminta untuk membayar biaya khusus sebelum keluhan mereka bisa didaftarkan, dan bahwa dalam beberapa kasus, mereka dipaksa untuk menyelesaikan kasus mereka secara pribadi (Miller-Mullo 2012).

Ketidakadilan yang diterima perempuan Filipina tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan Grace Poe, perempuan yang duduk dibangku Dewan Senat dan Parlemen Filipina. Tidak hanya masalah yang disebutkan diatas, menurutnya perempuan di Filipina masih banyak mengalami kesulitan untuk menyuarakan isu kesetaraan gender. Supaya dihormati, perempuan harus bersikap tegas. Bahkan susunan pimpinan politik bisa dikaji ulang jika mereka bicara soal isu perempuan. Banyak perempuan masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama yang berada di pinggiran kota. Selain itu, tidak semua orang mendapatkan akses informasi. Jadi tidak semua perempuan mengetahui bahwa mereka bisa ikut serta dalam proses pengambilan keputusan (Strother, 2013).

Namun pada tahun 2016, berdasarkan *Global Gender Gap Index* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)* Filipina berhasil menempati peringkat 7 dunia untuk kesetaraan gender. Peringkat tersebut merupakan yang tertinggi di Asia, Filipina berada diatas bersanding dengan negara-negara maju di Eropa seperti Swiss, Islandia, Finlandia dan lain sebagainya (Report, Plan, and

Peace, 2017).¹ Hal ini tentu merupakan prestasi bagi Filipina yang mana dimasa lalu perempuan masih banyak mengalami bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, keberhasilan Filipina membangun kesetaraan gender juga menjadi sesuatu yang baru, mengingat kebanyakan negara-negara dikawasan Asia Tenggara menganut sistem patriarki. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang membuat pembangunan kesetaraan gender di Filipina bisa berhasil.

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan yakni membatasi objek atau permasalahan. Fungsinya adalah memberikan batasan-batasan yang akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain akan mencegah kemungkinan pengertian dan kekaburan wilayah pengertian (Sutrisno, 1984). Ruang lingkup pembahasan yang digunakan terdiri dari dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan Materi menunjukkan ruang pembahasan objek yang mencakup segala informasi untuk memberikan fokus selama proses penelitian dan menemukan garis besar permasalahan. Batasan materi dalam penelitian ini yaitu membatasi permasalahan pada keberhasilan pembangunan gender di Filipina berdasarkan empat pilar dari WEF.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan Waktu menunjukkan rentang waktu yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisa suatu fenomena atau peristiwa. Batasan waktu berfungsi untuk menentukan kapan penelitian dimulai dan berakhir. Sehingga penelitian dapat terarah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam mengkaji fenomena. Dalam penelitian ini, batasan waktu yang digunakan penulis yaitu

¹*World Economic Forum (WEF)* sendiri adalah laporan tahunan peringkat dari kesetaraan gender yang berfokus pada 4 pilar utama yaitu: kesempatan dan partisipasi ekonomi, pendidikan, pemberdayaan politik, dan kesehatan dan kemampuan untuk bertahan hidup.

sejak tahun 2013-2016. Tahun 2013-2014 diambil karena tahun ini merupakan titik awal dari bangkitnya kembali gerakan isu gender di Filipina.

Sedangkan tahun 2015 dan 2016 diambil karena pada tahun ini Filipina berhasil menduduki peringkat 7 dunia dan yang terbaik se-Asia dalam bidang kesetaraan gender yang dikeluarkan *World Economic Forum (WEF)*.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah menjadi bagian yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu pertanyaan atau masalah. Pertanyaan memiliki dua tujuan yaitu untuk menentukan jenis penelitian yang akan digunakan dan untuk menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi (Bakry 2016). Kedua tujuan tersebut harus didukung dengan data-data yang akurat sehingga pertanyaan yang dibuat dapat dijawab dengan akurat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Faktor-Faktor Apa yang Mendorong Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender di Filipina?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara konseptual tujuan dalam suatu penelitian berfungsi untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam suatu penelitian (Universitas Jember 2012). Berdasarkan pada permasalahan sebagaimana telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya maka, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang membuat keberhasilan pembangunan kesetaraan gender di Filipina.

1.5. Landasan Konseptual

Landasan konseptual berfungsi untuk mensistematisasikan penemuan penelitian, mendorong, menyusun hipotesa dan mencari jawaban, serta menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan yang dibuat (Ikbar 2012). Menurut Mochtar Mas'ood, teori merupakan penjelasan tentang mengapa sesuatu dapat terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian, selain

berfungsi sebagai eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari suatu prediksi (Mochtar 1990). Sehingga proses analisa lebih mudah dilaksanakan.

1.5.1 Konsep Pembangunan Gender (Berdasarkan Tujuan Kelima SDGs)

Berangkat dari permasalahan yang akan diteliti, gender sendiri merujuk pada karakteristik konstruksi sosial perempuan dan laki-laki - seperti norma, peran dan hubungan antar kelompok perempuan dan laki-laki (WHO, 2012). Gender sendiri beragam dari masyarakat ke masyarakat dan bisa diubah. Sementara kebanyakan orang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, mereka akan diajarkan sesuai norma dan perilaku - termasuk bagaimana mereka harus berinteraksi dengan orang lain baik dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dan tempat kerja. Bila individu atau kelompok tidak "menyesuaikan" dengan norma gender yang ditetapkan, mereka sering menghadapi stigma, praktik diskriminatif atau pengucilan sosial - yang semuanya berdampak buruk pada keadaan sosial negara tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut, PBB dan berbagai negara didunia membuat kesepakatan untuk membuat program pembangunan berkelanjutan yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Dimana pada salah satu tujuan tersebut berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, untuk mewujudkan hal ini *UN Women* sebagai induk organisasi khusus perempuan akan bekerjasama dengan berbagai negara untuk mewujudkan kesetaraan gender dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

SDGs sendiri diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan perogram sebelumnya yaitu MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, *SDGs (Sustainable Development Goals)* memiliki 17 tujuan dengan 169 target, dimana tujuan dan target-target dari *SDGs* ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target *SDGs* tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu.

Tujuan dari *SDGs (Sustainable Development Goals)* antara lain sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari semua tujuan SDGs yang disebutkan diatas, tujuan kelima sangat relevan dengan penelitian penulis terkait keberhasilan Filipina dalam menerapkan kesetaraan gender di negaranya. Konsep ini yang nantinya akan dijadikan acuan oleh penulis dalam melanjutkan penelitian ke tahap selanjutnya.

Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan (Rima 2017). Dengan kata lain, ini berarti semua manusia punya akses dan kontrol yang wajar dan adil terhadap sumber daya dan manfaatnya, agar semua orang dapat berpartisipasi di dalamnya, serta memutuskan dan memperoleh manfaat dari pembangunan yang ada.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki -- laki dan perempuan. Sebagaimana ditegaskan oleh ILO (*International Labour Organization*) (2000) bahwa keadilan gender sebagai keadilan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, berdasarkan kebutuhan masing-masing. Ini mencakup perlakuan sama atau perlakuan yang berbeda tapi dianggap setara dalam hal hak, keuntungan, kewajiban dan kesempatan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terminologi kesetaraan gender seringkali disalahartikan dengan mengambil alih pekerjaan dan tanggung jawab laki-laki. Misalnya bekerja untuk mengangkat barang-barang yang berat, mengganti atap rumah, menjadi nelayan atau berburu di hutan dan lainnya.

Kesetaraan Gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke tangan perempuan, bukan pula mengambil alih tugas dan kewajiban seorang suami oleh istrinya. Jika hal ini yang terjadi, bukan 'kesetaraan' yang tercipta melainkan penambahan beban dan penderitaan pada perempuan.

Pada prinsipnya bahwa kesetaraan gender merupakan anggapan terhadap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (adil), baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan mempunyai kedudukan yang sama, maka setiap individu mempunyai hak-hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang mereka berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya.

Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengacu pada kesetaraan hak, tanggung-jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian atas perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam kehidupan maupun di tempat kerja. Kesetaraan Gender adalah kebebasan memilih peluang-peluang yang diinginkan tanpa ada tekanan dari pihak lain, kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pengambilan keputusan dan di dalam memperoleh manfaat dari lingkungan. Dalam situasi yang setara ini tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin seseorang dalam memperoleh kesempatan dan alokasi sumber daya, manfaat atau dalam mengakses pelayanan.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam tujuan kelima dari *SDGs (Sustainable Development Goals)* yang mengutamakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Konsep kesetaraan gender yang dicantumkan pada salah satu tujuan *SDGs (Sustainable Development Goals)* sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis terkait keberhasilan Filipina dalam menerapkan kesetaraan

gender di negaranya (United Nations 2015). Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tujuan kelima SDGs menurut UNDP antara lain:

1. Kapasitas Teknis untuk Mewujudkan Kesetaraan.

Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memerlukan keahlian teknis dan pengetahuan tentang bagaimana mengutamakan masalah gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan. Pada Konferensi Dunia Keempat tentang Wanita 1995, masyarakat internasional mendukung pengutamaan gender sebagai respon kelembagaan utama untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Pengutamaan gender didefinisikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1997 sebagai:

proses menilai implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap tindakan yang direncanakan, termasuk pelaksanaan peraturan, kebijakan atau program pada semua wilayah dan semua tingkat. Strategi ini digunakan untuk menghapus keprihatinan dan pengalaman buruk perempuan sekaligus laki-laki sebagai dimensi integral dari rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta program pada semua bidang politik maupun ekonomi sehingga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan keuntungan dan persamaan hak. Tujuan utamanya adalah mencapai kesetaraan gender (ECOSOC, 1997).

2. Struktur dan Proses Kelembagaan

Transformasi institusional - perubahan mendasar dalam peraturan yang menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan nilai diberikan pada masyarakat - merupakan faktor kedua yang penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam skala besar (Kabeer dan Subrahmanian 1996; Kelleher 2002). Organisasi perempuan adalah agen kunci dalam mewujudkan transformasi institusional secara nasional dan internasional karena mereka mengartikulasikan prioritas perempuan dan mengatur serta menganjurkan perubahan.

Organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil telah mengambil keputusan dalam memegang pemerintah dan badan-badan internasional yang bertanggung jawab untuk menerapkan komitmen mereka terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Memang, sebagian besar kemajuan yang dicapai sampai saat ini dihasilkan dari usaha politik dan mobilisasi organisasi semacam itu. Untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik, mereka memerlukan data, sumber daya, dan mekanisme untuk konsultasi reguler. Audit gender adalah alat pemantauan yang dapat membantu instansi pemerintah dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menilai apa yang sedang dilakukan di dalam institusi untuk mempromosikan kesetaraan gender dan mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang perlu ditangani.

3. Kepemilikan Sumber Daya

Kedua faktor diatas tentu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya yang memadai. Seperti yang kita ketahui, tujuan yang ingin dicapai suatu negara tidak akan terwujud tanpa adanya sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Wujud dari kesetaraan gender disini adalah untuk menunjukkan korelasi antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam menciptakan kesetaraan yang sesuai dengan tujuan negara. Kepemilikan sumber daya alam yang melimpah akan percuma jika tidak diiringi dengan keahlian untuk mengelola sumber daya tersebut. Maka dari itu, interaksi yang baik antara sumber daya alam dan sumber daya manusia akan mewujudkan tujuan yang sesuai dengan keinginan negara, yakni kesetaraan atau keadilan.

4. Akuntabilitas dan Sistem Pengawasan.

Sistem pertanggungjawaban dan pengawasan dibutuhkan secara nasional dan internasional untuk memastikan bahwa perubahan mendasar bersifat luas dan berjangka panjang. Di tingkat negara, sistem yang dibutuhkan mencakup kerangka hukum dan mekanisme penegakan hukum yang kuat baik di dalam maupun di luar pemerintah serta wujud

gerakan perempuan dan proses terbuka yang kuat, memungkinkan kelompok perempuan menginformasikan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah serta alokasi sumber daya.

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) menyediakan mekanisme hukum yang kuat bagi para pemangku kepentingan di tingkat negara untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan Tujuan kelima SDGs. Kewajiban pelaporan yang ditetapkan dalam konvensi tersebut, didukung oleh pekerjaan dari Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (badan yang terdiri dari 23 ahli yang memantau pelaksanaan konvensi) dan organisasi masyarakat sipil, menciptakan kondisi untuk memungkinkan perempuan menikmati hak mereka sepenuhnya. Seringkali, proses pelaporan ini telah menciptakan kemitraan antara pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan badan-badan PBB untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan konvensi tersebut (Stalker, 2008). Konvensi tersebut memiliki dampak positif di negara-negara di seluruh dunia. Hal ini telah menyebabkan penguatan ketentuan konstitusional di banyak negara yang menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dan memberikan dasar konstitusional untuk melindungi hak asasi perempuan.

Dalam hal ini, penulis merasa bahwa konsep kesetaraan gender berdasarkan tujuan kelima SDGs ini relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. terbukti pada tahun yang sama, Filipina berhasil mendapat pengakuan sebagai *A World Leader in Gender Equality*. Pengakuan ini dikeluarkan oleh *The World Bank* dalam bidang legitimasi, manajemen, dan pemerintahan (Camellie, 2016).

1.5.2 Konsep Pembangunan Gender (Berdasarkan Ketentuan WEF)

Konsep pembangunan gender merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memperhatikan dan mempersoalkan perbedaan peran dan kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam merumuskan pembangunan yang responsif gender. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dampak pembangunan

terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki tidak akan berbeda. Keduanya akan sama-sama memperoleh manfaat dari hasil pembangunan. Pengarusutamaan gender adalah strategi kunci dalam pendekatan Gender dan Pembangunan. Dalam melakukan strategi pengarusutamaan gender, ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender; pemahaman tentang konsep-konsep dasar sebagai alat analisis; dan kemampuan melakukan analisis gender, sangat diperlukan (Sarasvati, 2011).

Dalam konteks ini pembangunan dipandang sebagai suatu proses yang kompleks yang melibatkan upaya-upaya perbaikan individu secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya dan juga upaya perbaikan masyarakat itu sendiri dimana perempuan dan laki-laki merupakan subyek yang aktif dan bukan penerima pembangunan yang pasif. Dalam pengertian ini, perbaikan adalah memberdayakan mereka yang dirugikan termasuk perempuan, dan merubah relasi-relasi yang tidak setara termasuk relasi-relasi antar gender. Tujuannya merubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan potensi-potensi dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Ditingkat internasional ada sebuah lembaga yang setiap tahunnya memberikan laporan mengenai perkembangan pembangunan gender setiap negara di dunia yang diberi nama *Global Gender Gap Index*. Lembaga yang membuat laporan pembangunan gender tersebut yaitu *World Economic Forum* (WEF). *Global Gender Gap Index* pertama kali diperkenalkan oleh WEF pada tahun 2006 sebagai kerangka kerja untuk menangkap besarnya kesenjangan berbasis gender dan melacak kemajuan gender dari waktu ke waktu.

Laporan tahun ini menetapkan 144 negara mengenai kemajuan mereka menuju kesetaraan gender pada skala dari 0 (ketidakseimbangan) hingga 1 (kesetaraan) pada empat dimensi tematik yaitu; Kesempatan dan Partisipasi Ekonomi, Pendidikan, Pemberdayaan Politik, serta Kesehatan dan Kemampuan Bertahan Hidup. Selain itu, WEF juga memberikan peringkat negara yang memungkinkan perbandingan lintas wilayah dan pendapatan secara efektif. Peringkat tersebut dirancang untuk menciptakan kesadaran global tentang tantangan yang ditimbulkan oleh kesenjangan gender. Metodologi dan analisis

kuantitatif di balik peringkat ini dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah efektif dalam mengurangi kesenjangan gender. Metodologi Indeks yang dikeluarkan tetap stabil sejak konsep awalnya muncul pada tahun 2006, dengan memberikan dasar analisis lintas negara dan jangka waktu yang panjang.

Seperti yang telah disebutkan diatas, konsep untuk menuju kemajuan pembangunan gender terdiri dari empat indikator. Diantaranya:

1. Kesempatan dan Partisipasi Ekonomi

Indikator ini berisi tiga konsep: jeda partisipasi, kesenjangan pembagian upah dan kesenjangan kemajuan. Kesenjangan partisipasi diperoleh menggunakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Kesenjangan pembagian upah diperoleh melalui indikator data keras (rasio perkiraan pendapatan perempuan per orang) dan indikator kualitatif yang dikumpulkan melalui Survei Opini Eksekutif tahunan Forum Ekonomi Dunia (kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa). Akhirnya, kesenjangan antara kemajuan perempuan dan laki-laki diperoleh melalui dua data statistik kuat (rasio perempuan terhadap laki-laki di antara legislator, pejabat senior dan manajer, dan rasio perempuan terhadap laki-laki di antara pekerja teknis dan profesional).

2. Pendidikan

Indikator ini menangkap akses kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki melalui rasio pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Pandangan jangka panjang tentang kemampuan negara untuk mendidik perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama ditangkap melalui rasio tingkat buta huruf perempuan terhadap tingkat buta huruf laki-laki.

3. Pemberdayaan Politik

Indikator ini mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan pada tingkat tertinggi pengambilan keputusan politik melalui rasio perempuan terhadap laki-laki dalam posisi menteri dan rasio

perempuan terhadap laki-laki dalam posisi parlemen. Selain itu, WEF juga memasukkan rasio perempuan terhadap laki-laki selama setahun pada bagian eksekutif (perdana menteri atau presiden) selama 50 tahun terakhir. Kelemahan yang jelas dalam kategori ini adalah tidak adanya indikator yang menangkap perbedaan antara partisipasi perempuan dan laki-laki di tingkat pemerintah daerah. Jika data tersebut tersedia di tingkat komparatif global di tahun-tahun mendatang, maka akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam indikator.

4. Kesehatan dan Kemampuan Bertahan Hidup

Indikator ini memberikan ikhtisar tentang perbedaan antara kesehatan perempuan dan laki-laki melalui penggunaan dua faktor. Yang pertama adalah rasio jenis kelamin saat lahir, yang bertujuan khusus untuk menangkap fenomena "*missing women*", yang lazim di banyak negara dengan preferensi laki-laki yang kuat. Kedua, menggunakan kesenjangan antara harapan hidup sehat perempuan dan laki-laki. Langkah ini memberikan perkiraan jumlah usia yang dapat diharapkan oleh perempuan dan laki-laki untuk hidup sehat dengan mempertimbangkan waktu yang hilang akibat kekerasan, penyakit, kekurangan gizi dan faktor-faktor relevan lainnya.

Keempat indikator diatas menjadi penentu keberhasilan pembangunan gender yang dilakukan Filipina. Keberadaan Filipina di peringkat teratas membuat Filipina menjadi satu-satunya negara di Asia yang berhasil bersaing dengan negara-negara di Eropa. Kemampuan pemerintah Filipina dalam menangani masalah gender membuka kesempatan perempuan untuk menjadi wakil di parlemen atau bahkan menjadi presiden. Misalnya, Gloria Macapagal-Arroyo. Arroyo menjadi presiden perempuan Filipina yang menjabat selama dua periode (2001-2010). Banyak isu perempuan yang berhasil dia angkat, hingga yang paling tren yaitu pentingnya program keluarga berencana sebagai pengganti alat kontrasepsi (Britanica, 2018). Maka dari itu, konsep ini digunakan oleh penulis karena relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti.

Kedua konsep diatas akan dikorelasikan untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti, dimana indikator penentu keberhasilan pembangunan gender menurut WEF akan dijelaskan dalam faktor keberhasilan pembangunan gender sesuai dengan tujuan dari SDGs, hal ini dilakukan karena indikator yang dikeluarkan oleh WEF merupakan bagian dari pembangunan gender berdasarkan tujuan kelima SDGs.

1.6. Argumen Utama

Mengacu pada rumusan masalah dan landasan konseptual diatas, maka penulis merumuskan argumen utama sebagai berikut:

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan pembangunan kesetaraan gender di Filipina karena: pertama, pemerintah Filipina memiliki kapasitas teknis untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kedua, adanya struktur dan proses kelembagaan yang tertata baik. Ketiga sumber daya yang dimanfaatkan dengan maksimal, serta adanya sistem akuntabilitas dan sistem pengawasan yang bertujuan untuk menganalisa jalannya pembangunan gender. Selain itu, keberhasilan pembangunan gender di Filipina juga dikarenakan tercapainya indikator pembangunan kesetaraan gender berdasarkan ketentuan *World Economic Forum* (WEF).

1.7. Metode Penelitian

Karya tulis ilmiah membutuhkan suatu metode penelitian untuk menciptakan alur yang empiris. Metode adalah kegiatan teknis dalam menjalankan suatu proses keilmiahan. Sedangkan Todd landman mengatakan metode penelitian merupakan sarana dimana sebuah teori diturunkan dan diuji, termasuk pengumpulan bukti-bukti, perumusan pengujian hipotesis, dan akhirnya sampai pada kesimpulan substantif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa karya ilmiah dan sumber informasi lain sebagai pendukung penelitian. Sumber rujukan tempat penelitian yaitu:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember

Sedangkan untuk sumber data sekunder berasal dari:

1. Buku
2. Jurnal
3. Situs resmi pemerintah dan organisasi internasional
4. Koleksi pribadi

1.7.2 Metode Analisa Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data-data yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sehingga dengan adanya analisis data ini dapat digunakan penulis untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan sebuah fenomena dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan.

1.8. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum dari karya tulis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang kondisi perempuan di Filipina. Selain itu pada bab 1 juga dijelaskan metodologi penelitian berupa teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Bab 1 juga bertujuan untuk menguraikan landasan konseptual yang berfungsi mendukung analisis penulis.

BAB 2 : Gambaran Umum Keadaan Gender di Filipina

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum gender di Filipina. Berawal dari sejarah singkat kolonial hingga lengsernya Presiden Ferdinand Marcos pada tahun 1986, banyak muncul gerakan-gerakan penuntut hak asasi perempuan oleh masyarakat Filipina dan penghapusan segala bentuk diskriminasi, perbedaan perlakuan, perdagangan perempuan dsb. Namun isu gender sempat tenggelam cukup lama dan mulai muncul kembali pada tahun 2014 yang kemudian menjadi fokus penting pada tahun 2015 hingga tahun 2016.

BAB 3 : Proses Pembangunan Kesetaraan Gender di Filipina

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembangunan gender melalui norma-norma dan nilai internasional serta menjelaskan implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina terkait dengan kesetaraan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada keberhasilan pembangunan gender.

BAB 4 : Faktor-faktor Keberhasilan Pembangunan Kesetaraan Gender di Filipina

Pada bab ini penulis akan menjelaskan keberhasilan Filipina dalam menerapkan konsep gender dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik di negaranya. Penulis juga akan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung program kesetaraan gender serta faktor eksternal lainnya seperti gerakan-gerakan kelompok atau organisasi lokal maupun internasional yang berfokus pada upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender di Filipina.

BAB 5 : Penutup

Pada bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dan penutup karya ilmiah ini.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KEADAAN GENDER DI FILIPINA

Filipina adalah negara yang terletak dikawasan Asia Tenggara dengan penduduk sekitar 100juta lebih pada tahun 2017 dengan angka harapan hidup 72,28 untuk perempuan dan 66,44 untuk laki-laki(National Commission on the Role of Filipino Women, 1980). Hal ini menunjukkan bahwa populasi perempuan di negara ini lebih tinggi dan membuat Filipina menjadi negara yang mampu memanfaatkan kemampuan sumberdaya manusianya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Gerakan perempuan yang dinamis di Filipina adalah produk dari sejarah perjuangan dan partisipasi yang panjang. Sebagai negara yang pernah mengalami masa penjajahan yang kelam dimasa lalu, semua masyarakat melakukan upaya perlawanan dan memperjuangkan kemerdekaan termasuk perempuan. Dari upaya tersebut gerakan perempuan di Filipina mulai berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi. Dengan demikian, upaya untuk memahami karakteristik gerakan perempuan saat ini, penulis akan membahas peran perempuan di Filipina mulai dari perempuan pra-kolonial hingga saat ini.

2.1 Sejarah Gerakan Gender di Filipina

Dalam masyarakat Filipina pra-kolonial, babaylan adalah representasi utama status yang diberikan kepada perempuan dalam barangay.² Babaylan sangat memperhatikan budaya, agama, kesehatan dan pengetahuan teoritis yang penting untuk mengatur perilaku masyarakat Filipina pada era itu. Babaylan merupakan ilmuwan pertama dalam masyarakat Filipina kuno. Meskipun peran babaylan sering diberikan pada perempuan, terkadang ada juga laki-laki yang melakukan peran tersebut walaupun sebagian besar memiliki perilaku seperti perempuan atau bahkan mengakui bahwa dirinya seorang homoseksual. Babaylan sendiri tidak tunduk pada datu, yang dianggap sebagai anggota klan terkaya, terkuat, paling bijak, dan paling berani (diagungkan). Sebagai gantinya, sang datu dan babaylan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Sebagai pemimpin spiritual, babaylan

² Barangay adalah sebuah pemerintah daerah atau unit politik dasar di Filipina.

bertanggung jawab atas beberapa ritual, termasuk kepentingan pertanian. Dengan pengetahuannya tentang astronomi, babaylan menentukan waktu yang tepat untuk membersihkan lahan, serta bagaimana melakukan siklus tanam dan panen. Babaylan juga belajar dan mengambil alih pengobatan, mengembangkan pengetahuannya dan meneruskannya (Evangelista, 2017). Dengan demikian, babaylan bukan hanya seorang pendeta atau tokoh budaya, tapi juga seorang “dokter” atau penyembuh bagi masyarakat. Persona babaylan mewujudkan peran tradisional perempuan dalam masyarakat Filipina pra-kolonial: Mereka menjalankan fungsi vital, serta diakui sebagai pemimpin sosial dan budaya.

Namun dengan datangnya orang-orang Spanyol, status babaylan berubah drastis, mereka dan filosofi mereka dipandang sebagai kutukan terhadap kepercayaan agama penjajah, oleh karena itu mereka harus diberantas demi iman Kristen (Gaborro, 2009). Orang-orang Spanyol tersebut membuat mereka marah dan mengklaim bahwa babaylan dikaruniai kekuatan dari ilmu hitam. Di samping indoktrinasi Kristen yang agresif, para biarawan tidak hanya menyembunyikan keyakinan religius dan spiritual perempuan, tapi juga mengendalikan tubuh dan nafsu seksual mereka: seksualitas mereka ditekan dan dikendalikan melalui praktik seperti pengakuan dosa. Para biarawan mengambil kebebasan untuk memperluas cakupan doktrin Kristen tentang larangan perzinahan dan memberi label kegiatan seksual lainnya sebagai orang berdosa (Gealogo, 2010).

Isu seksualitas dalam konteks kolonial dapat dinilai sebagai isu untuk menciptakan persepsi dan kesadaran tentang seks dan tubuh perempuan. Gereja Katolik, yang mengangkat dirinya sebagai satu-satunya sumber moralitas untuk rakyatnya, melampaui lingkup publik dan bahkan menembus aspek pribadi dan individual kehidupan penduduk setempat. Dalam usaha tersebut, perempuan merupakan salah satu sasaran yang paling rentan, terutama dalam konteks Gereja Katolik Spanyol feodal dan patriarkal.

Partisipasi perempuan dalam bidang yang didominasi laki-laki dapat ditelusuri kembali dalam Revolusi Filipina melawan Spanyol (1896-1898) dan Perang Filipina-Amerika pada tahun-tahun berikutnya. *Asociacion Filantropica dela Cruz Roja* (juga dikenal sebagai Junta Patriotica dela Cruz Roja) sebagai

asosiasi penting yang didirikan atas bantuan revolusi, mengumpulkan dana untuk perang dan merawat tentara revolusioner yang terluka. Keanggotaan Cruz Roja secara mencolok terdiri dari keluarga ilustrado terkemuka dan terikat pada orang-orang penting dalam revolusi. Salah satu kontribusi perempuan dalam revolusi yang paling menonjol namun seringkali tidak diketahui, dapat ditemukan dalam bidang literatur. Mereka menerbitkan puisi dalam publikasi revolusioner seperti *El Heraldo de la Revolucion* dan *La Independencia* (Camagay, 1998). Hal ini menyiratkan bahwa kontribusi perempuan dalam revolusi tidak hanya bersifat logistik tapi juga intelektual, seperti yang terlihat pada literatur yang mereka produksi. Selain itu, perempuan juga membawa pasukan ke dalam pertempuran. Perempuan yang benar-benar bertempur di medan perang selama perang Filipina-Amerika dipuji di berbagai penjuru negeri seperti Aguada Kahabagan dari Laguna, Trinidad Tecson dari Bulacan, dan Teresa Magbanua dari Iloilo. Namun, bukan berarti perempuan yang aktif sebagai pejuang revolusi, tidak rentan terhadap pelecehan di masyarakat patriarki dan feodal. Justru banyak terjadi pemerkosaan perempuan Filipina yang dilakukan oleh tentara revolusioner Filipina.

Abad ke-20 merupakan perkembangan yang lebih menarik dalam sejarah gerakan perempuan di Filipina. Pada tahun 1905, Concepcion Felix de Calderon mendirikan organisasi feminis pertama yaitu *Asociacion Feminista Filipina (AFF)*. Concepcion Felix berasal dari kelas pekerja, meskipun dia bergabung dengan perempuan dari kalangan elite seperti Trinidad Rizal, Librada Avelino, Maria Paz Guanzon, Maria Francisco, saudara perempuan Almeda dan Luisa de Silyar (Estrada-Claudio, 2005). *Asociacion Feminista Ilonga* didirikan setahun kemudian, dipimpin oleh wanita elit Pura Villanueva-Kalaw, dan terlibat dalam perjuangan hak perempuan untuk memilih. Hak perempuan untuk mendapatkan hak pilih disetujui melalui pemungutan suara pada tanggal 30 April 1937 dengan catatan 90% dalam suara afirmatif (Quindoza-Santiago, 1996).

AFF mendirikan *La Proteccion de la Infancia, Inc.* dan kemudian mengelola *Gota de Leche*, yang peduli dengan kesehatan perempuan dan anak-anak berdasarkan tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi terutama di kalangan

orang miskin. Sebuah organisasi wanita berbasis massa juga diciptakan atas nama *Samahang Makabayan ng Babaing Pilipino* atau Liga Nasional Perempuan Patriotik pada tahun 1937. Terdiri dari anggota perempuan organisasi sakralista nasionalis, pro-kemerdekaan, anti-Amerika. *Samahang Makabayan* adalah sebuah kasus yang aneh. Mereka percaya bahwa perempuan harus menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam politik. Mereka percaya bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender adalah nilai-nilai Barat (Terami-Wada, 2014).

Selama Perang Dunia Kedua, perempuan Filipina menjadi sasaran kejahatan perang. Beberapa dari mereka menjadi korban, bukan hanya pemerkosaan tapi juga kejahatan perbudakan seksual yang lebih berat. Fenomena ini termasuk dalam kasus terburuk pemerkosaan sistematis yang diderita perempuan dalam masa perang (Kinantar, 1996). Beberapa dijanjikan pekerjaan, dan kemudian dibawa ke suatu rumah dimana mereka mengalami pemerkosaan berulang-ulang oleh puluhan tentara Jepang setiap hari. Perempuan penghibur termuda berusia sekitar sembilan tahun. Sebagian besar diculik secara paksa, diperkosa berulang-ulang, dan dipaksa melakukan pekerjaan untuk tentara Jepang.

Di tengah korban yang merajalela, ada perempuan yang secara aktif berpartisipasi dalam perlawanan bersenjata melawan penindas Jepang. Di antara perempuan-perempuan ini yang paling populer adalah Felipa Culala, yang dikenal dengan nama alias Dayang-dayang. Culala adalah seorang komandan gerilya perempuan yang memimpin salah satu pasukan gerilya paling awal melawan orang Jepang pada tahun 1942 sebagai bagian dari perlawanan bersenjata yang populer bernama HUKBALAHAP atau *Hukbong Bayan Laban dan Hapon* (Tentara Rakyat Melawan Jepang). Dia memimpin penyerangan pasukan Jepang dan Filipina yang menewaskan sekitar 30-40 pasukan Jepang dan 68 polisi Filipina, serta merampas persenjataan mereka. Gerilyawan perempuan secara stereotip diberi label sebagai *Huk Amazons* oleh pers dan pemerintah Filipina pasca perang (Lanzona, 2009).³

³*Huk Amazon* adalah prajurit perempuan Filipina ketika penjajahan Spanyol.

2.2 Masalah Gender yang di Hadapi Filipina

Isu gender merupakan salah satu isu yang sering diperdebatkan dan menjadi perhatian dalam melaksanakan sebuah kebijakan pembangunan, baik dalam segi kehidupan ekonomi, sosial-budaya, dan politik. Bahkan isu gender menjadi isu yang diperdebatkan dalam pembahasan ketenagakerjaan. Isu gender bukanlah isu yang muncul akibat perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat pada kondisi ketidaksetaraan dan perlakuan diskriminatif dalam berbagai kehidupan. Kondisi tersebut juga terjadi akibat dari proses diskriminasi sosial-budaya yang melahirkan stereotip adanya perbedaan dan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Di Filipina masalah gender yang dihadapi cukup kompleks, beberapa yang paling berpengaruh yakni faktor agama, budaya atau adat istiadat, dan keterbatasan akses informasi. Ketiga faktor ini membuat Filipina mengalami banyak permasalahan (gender) yang harus diselesaikan, segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan yang terjadi semakin mempersulit pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan tersebut, akan dijelaskan sebagaimana berikut ini:

2.2.1 Faktor Agama

Agama merupakan kepercayaan yang dianut setiap individu. Agama tidak dapat lepas dari sistem budaya dan pandangan dunia tentang tatanan kehidupan. Agama juga merupakan perantara hubungan manusia dengan penciptanya, semua aspek kehidupan diajarkan untuk menuntun manusia menjadi individu yang lebih baik dan berguna.

Setiap negara pasti memiliki agama atau kepercayaan yang menjadi mayoritas. Di Filipina agama terbesar yang dianut masyarakat adalah Kristen. Sekitar 92% penduduknya adalah Kristen: sekitar 81% menganut Gereja Katolik Roma sementara sekitar 11% menganut denominasi-denominasi Kristen Protestan, seperti Gereja Adventis Hari Ketujuh, Gereja Serikat Yesus di Filipina dan Evangelikal (IRFR, 2013). Secara resmi, Filipina adalah sebuah negara sekuler

dengan Konstitusi memandu pemisahan gereja dan negara, dan meminta pemerintah untuk menganggap seluruh agama setara.

Gereja Katolik Roma merupakan agama suci yang dipimpin oleh paus. Memang benar bahwa Filipina sama dengan Vatikan. Salah satu dari dua negara yang melarang keras perceraian seperti dasar ajaran Katolik dan Kristen dimana hal yang disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan manusia (Maharani, 2013). Dengan populasi penduduk 80 persen penganut Katolik Roma taat di Asia, pemimpin umat agama ini tetap teguh pada ikatan pernikahan sekali seumur hidup meski pemimpin Vatikan Paus Fransiskus sedikit lembut pada masalah ini. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi permasalahan yang dialami perempuan-perempuan Filipina.

Banyaknya pernikahan usia dini yang dilakukan oleh perempuan Filipina membuat mereka terjebak dalam pernikahan yang tidak harmonis. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkeluarga, sehingga membuat perempuan tersebut mengalami kekerasan atau diskriminasi. Kantor Statistik Nasional negara Filipina melalui Survei Demografi dan Kesehatan Nasional pada 2008 menemukan, satu dari tujuh perempuan menikah mengalami kekerasan fisik dari para suaminya. Selain fisik, kekerasan terjadi dalam bentuk emosional, seksual, dan ekonomi. Bukannya berkurang, jumlah ini meningkat di 2012. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Kepolisian Nasional Filipina (PNP) meningkat 23,3 persen, atau dari 12.984 kasus di tahun sebelumnya menjadi 15.969 tahun 2012. Akan tetapi perempuan yang mengalami diskriminasi dalam keluarga tidak dapat berbuat apa-apa.

Selain itu, di Filipina, karena tidak ada perceraian, yang bisa ditempuh adalah pembatalan pernikahan. Sebuah pernikahan dinyatakan batal bila ditemukan ketidakmampuan psikologis oleh salah satu pasangan. Masalah lain yang menyebabkan pembatalan pernikahan harus sangat spesifik seperti penyakit seksual menular yang berbahaya, atau terjadinya pernikahan paksa. Rumah tangga yang tak bahagia, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga tak bisa dijadikan alasan pasangan untuk bercerai (Heifetz, 2017). Tetapi sangat jarang

perempuan Filipina melakukan pembatalan pernikahan sebab memakan waktu, birokrasinya kompleks, melalui proses panjang, dan biayanya sangat mahal.

Maka dari itu, keterbatasan kesempatan perempuan untuk memulai berumah tangga lagi hampir tidak bisa terjadi di Filipina. Hal ini dijadikan alasan yang kuat oleh perempuan untuk menuntut hak mereka dalam perceraian, karena mereka percaya bahwa perempuan seharusnya mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga.

2.2.2 Faktor Budaya

Asia Tenggara merupakan kawasan yang kebanyakan menganut sistem patriarki. Patriarki adalah sistem kepemimpinan oleh laki-laki, di dominasi laki-laki, dan di kuasai laki-laki, patriarki juga merupakan suatu sistem untuk mengendalikan perempuan melalui ketergantungan ekonomi, kekerasan, dan domestikasi, serta merupakan sistem yang menugaskan perempuan ke ranah privat rumah dan keluarga dan mengarahkan laki-laki ke ranah publik bekerja dan pengambilan keputusan. Selain itu, patriarki adalah seperangkat keyakinan dan nilai-nilai yang didukung oleh ancaman kekerasan. Patriarki juga berarti meletakkan hubungan yang semestinya antara laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan perempuan, dan laki-laki dengan laki-laki. Patriarki memaksakan struktur bahwa laki-laki harus bekerja dan perempuan mengurus rumah tangga. Hal ini membuat pekerjaan laki-laki lebih bernilai, lebih berarti, dan lebih dihargai (Reardon, 1996).

Sistem patriarki ini juga dianut oleh masyarakat Filipina. Dalam urusan pekerjaan, perempuan mengalami keterbatasan untuk mendapatkan akses pekerjaan diluar rumah karena mereka sibuk sebagai ibu rumah tangga. Bekerja di luar rumah juga tidak menghasilkan pembebasan karena kebanyakan masih di dominasi oleh laki-laki. Sebagian besar pekerjaan yang terbuka bagi perempuan biasanya merupakan perluasan dari peran pengasuhan, pendidikan yang mereka lakukan di rumah: guru, perawat, bidan, pekerja sosial, wiraswasta, penjual dan pekerjaan sampingan lainnya di sektor jasa. Dalam dua dekade terakhir, para pekerja perempuan terpicat untuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor

seperti elektronik dan pakaian, namun lagi-lagi perempuan menerima upah yang rendah.

Sekitar 41% dari penduduk perempuan Filipina adalah pengangguran. Sebagai pekerja, mereka cenderung menempati posisi yang lebih rendah. Pada tahun 2011, mereka hanya mewakili 25% dari jabatan manajerial dan eksekutif. Perempuan umumnya mendapat bayaran lebih rendah. Situasi ini sering dikaitkan dengan perempuan yang dikategorikan memiliki keterampilan rendah, jam kerja yang lebih pendek karena memiliki beban ganda dan pengalaman yang lebih rendah (ILO, 2012).

Kurangnya kesempatan dan kondisi kerja yang tidak menguntungkan juga membuat perempuan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini membuat perempuan berada dalam bahaya yang lebih besar seperti eksploitasi seksual dan kekerasan fisik. Sementara itu hal ini juga merupakan ancaman serius terhadap kesejahteraan, martabat dan status mereka di hadapan dunia. Meskipun ada peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, mereka tidak menikmati kesempatan kerja itu, bahkan hak istimewa dan manfaat yang sebanding dengan laki-laki. Perempuan yang bekerja juga rentan terhadap pemindahan dan peminggiran oleh perusahaan-perusahaan besar, kontribusi mereka untuk pekerjaan rumah tangga dan ekonomi informal biasanya tidak tercatat dalam akun kerja standar dan hanya merupakan bagian dari tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar (Rodriguez, 2012).

Keadaan ini menunjukkan bahwa patriarki memang menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan kesetaraan gender di Filipina. Anggapan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat banyak perempuan kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kontribusinya dalam hal pembangunan ekonomi, padahal perempuan merupakan pengolah keuangan pertama dalam keluarga.

2.2.3 Keterbatasan Akses

Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial, politik, ekonomi, kultur masyarakat, sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan. Setidaknya ada beberapa aspek yang menunjukkan perempuan begitu dekat dengan kemiskinan, dikarenakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan (Noerdin, 2006).

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ekonomi tidak hanya menyangkut aspek finansial tetapi meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Secara politik, kemiskinan dilihat dari rendahnya akses terhadap kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam konteks ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya (Nugroho, 2008).

Aset produktif berupa tanah, rumah dan aset produktif lainnya sebagian besar dikuasai oleh laki-laki. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber produksi atau aset produktif seperti tanah atau rumah misalnya, juga menentukan ada tidaknya akses perempuan ke modal atau kredit. Karena aset produktif dikuasai oleh laki-laki. Apabila perempuan ingin melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aset tersebut, harus mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kontrol produksi yang didominasi oleh laki-laki. Dengan keterbatasan penguasaan aset produksi, maka perempuan juga sangat terbatas aksesnya ke kredit (karena tidak memiliki jaminan) sehingga ini berakibat pada keterbatasan perempuan dalam mengembangkan usahanya.

Keterbatasan akses tersebut kebanyakan dialami perempuan Filipina yang tinggal di daerah pesisir atau terpinggirkan. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, maka dari itu perempuan Filipina masih mengandalkan pemerintah yang berkuasa dan menerima segala keputusan yang dikeluarkan. Misalnya, perempuan yang tinggal di daerah pesisir

Sorsogon, Filipina. Kebanyakan perempuan disana hanya menjalani aktifitas sehari-hari dengan bercocok tanam dan membantu suami mereka mengelola hasil tangkapan ikan yang dilakukan. Mereka membersihkan, menimbang dan menjual ikan tersebut di pasar, yang hasil penjualannya dikelola untuk berbagai kebutuhan keluarga (PCW, 2012). Kesibukan inilah yang membuat mereka tidak mengerti bahwa mereka bisa terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka hanya mengerti bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan dan mengelola keuntungan tersebut untuk berbagai kebutuhan keluarga.

2.3 Awal Keterlibatan Perempuan dalam Politik

Bertahun-tahun setelah melalui perang, akhirnya masyarakat Filipina merasakan kedamaian. Banyak di antaranya menganggap pembentukan proses pemilihan merupakan upaya untuk menuju demokrasi, selain itu banyak kebutuhan perempuan untuk mengagitasi reformasi baru, apalagi untuk perubahan struktural dalam masyarakat (Santos, 2007). Umumnya, organisasi perempuan saat itu khawatir ketika menjalin mitra sosial dengan laki-laki. Disisi lain, terdapat pula kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, meningkatnya tekanan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang ditimbulkan oleh ketergantungan negara terhadap modal asing, serta korupsi yang tak terkendali. Kondisi menjadi semakin buruk setelah pemilihan 1969 - yang dianggap paling kotor dalam sejarah Filipina: Protes meningkat berkali lipat, dan pemerintah diancam dengan momentum pengorganisasian yang dipimpin oleh *Communist Party of the Phillipines (CPP)* yang baru dibentuk pada tahun 1969 (Abinales, 2005). Kemudian pada saat Triwulan Pertama tahun 1970 - sebuah periode perubahan yang ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dan konfrontasi kekerasan dengan polisi, hal ini sebagian besar didorong oleh gerakan mahasiswa radikal yang agendanya meminta perubahan drastis dalam struktur masyarakat dengan cara meningkatkan kesadaran kolektif orang-orang Filipina sehubungan dengan 'tiga kejahatan' yang diduga mengganggu masyarakat yang merasa dieksploitasi, oleh praktik 'imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat' (Santos, 2004).

Berbagai organisasi nasionalis dibentuk untuk melakukan demonstrasi seputar penyebab dan menyerukan kedaulatan dan demokrasi sejati.

Seiring dengan bangkitnya para siswa, pekerja, petani dan gerakan sosial lainnya, gerakan perempuan memperoleh momentum baru saat mulai berkembang sesuai dengan garis-garis Marxis. *The Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan* (Gerakan untuk Kebebasan oleh Progresif Wanita) atau MAKIBAKA, didirikan pada bulan Juli 1969, menempatkan pembebasan perempuan dalam konteks perjuangan melawan dominasi asing dan penindasan kelas (Valte, 1992). Tindakan MAKIBAKA yang paling berkesan adalah demonstrasi yang ditampilkan pada kontes kecantikan Miss Filipina pada tahun 1970. MAKIBAKA direorganisasi pada akhir 1970-an oleh gerakan demokratis nasional yang dipimpin Komunis, kemudian secara otonom Organisasi ini dibentuk kembali dan berorientasi pada *National Democratic Front* (NDF). Organisasi tersebut menyusut karena isu-isu perempuan dalam kerangka kerja nasional CPP, yang menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan akan datang apabila revolusi kelas telah dimenangkan. MAKIBAKA berusaha menyelesaikan isu-isu nasional, meskipun gerakan ini pada akhirnya dianggap terlalu ambisius (Library of Congress, 1991).

Pada tahun 1975, *Katipunan ng Bagong Pilipina* (KABAPA) didirikan oleh perempuan yang telah aktif dalam HUKBALAHAP dan gerakan pemberdayaan petani. Konstitusi KABAPA memiliki ciri khas feminisme Dunia Ketiga karena mengangkat isu-isu nasional, kelas, dan gender yang mana tujuannya untuk persamaan, pembangunan, perdamaian, kebebasan dan kebahagiaan anak-anak (Estrada-Claudio, 2005). Kemudian berdiri lagi organisasi perempuan yaitu, *Kilusang Kababaihang Pilipina* (Gerakan Perempuan Filipina) atau PILIPINA pada tahun 1981, dan *Katipunan ng Kalayaan para sa Kababaihan* (Organisasi Perempuan untuk Kebebasan) atau KALAYAAN pada tahun 1983. Kedua organisasi baru ini melihat perlunya gerakan perempuan yang terpisah dan otonom sehubungan dengan kerangka demokrasi nasional (Elumbre, 2010).

PILIPINA dan KALAYAAN adalah kelompok pertama yang fokus pada isu-isu perempuan, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Kedua kelompok tersebut meluncurkan sesi pembelajaran dan kampanye melawan seksisme di media, pelanggaran hak reproduksi perempuan, kekerasan gender, pelacuran dan diskriminasi gender dalam akses terhadap pekerjaan dan penetapan pendapatan.⁴ Untuk mengatasi masalah ini, wacana tentang perlindungan perempuan diperluas untuk mencakup analisis mendalam tentang berbagai manifestasi patriarki. Selain itu, kelompok perempuan ini menggarisbawahi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah gender di tingkat individu. Mereka memberikan dukungan kepada teman-teman, baik di dalam maupun di luar gerakan yang merupakan korban pelecehan seksual oleh militer selama masa darurat militer atau mereka yang memiliki masalah dengan pernikahan dan anggota keluarga mereka (Sobritchea, 2004).

PILIPINA, yang didirikan oleh advokat pembangunan sosial, mendeskripsikan sebuah masyarakat Filipina di mana perempuan memiliki martabat, otonomi, dan kesetaraan yang secara proaktif terlibat dalam pekerjaan sosial dan pembangunan kapasitas bagi perempuan. Organisasi ini melihat perkembangan sebagai ajang advokasi, dimana isu-isu pribadi perempuan bertentangan dengan ranah publik (Santos, 2007). PILIPINA mendefinisikan pembebasan perempuan dalam banyak hal: pembebasan dari kekerasan seksual dan rumah tangga, pembebasan dari dominasi kapitalisme global yang mengasingkan negara-negara Dunia Ketiga ke status kerja upahan, dan perempuan Dunia Ketiga sampai akhir akan memperoleh status terendah dari pekerjaannya. s

KALAYAAN, di sisi lain, lebih mirip dengan MAKIBAKA dalam keterlibatan aktifnya mengenai isu-isu kepentingan nasional. Selogan utamanya yaitu "*Kalayaan ng Bayan, Kalayaan ng Kababaihan, Sabay Nating Ipaglaban!*" (Marilah kita secara bersamaan berjuang demi kebebasan tanah dan perempuan) sebagian besar menjauh dari keutamaan perjuangan kelas dan perluasan (pendalaman) perspektif Marxis/Sosialis yang telah menciptakan perjuangan demokrasi nasional. Sementara para pendiri organisasi adalah semua aktivis dan kader gerakan demokrasi nasional, mereka menerima anggota dari

⁴ Seksisme adalah diskriminasi yang dilakukan berdasarkan gender atau jenis kelamin seseorang.

berbagai aliran politik dan juga perempuan dari posisi politik yang netral. Berbagai macam anggota ini turut menjadi bagian dari ketegangan politik yang kemudian menyebabkan politik feminis bersifat pribadi dan politis, hal ini berarti bahwa pengalaman pribadi para anggota dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan berbagai isu dan masalah yang ingin ditangani seperti diskriminasi, eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan. KALAYAAAN memang merupakan pendahulu langsung dari aliansi jaringan wanita terbesar dalam sejarah kontemporer: GABRIELA.

GABRIELA atau *General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action* didirikan pada tahun 1984 oleh kelompok perempuan dari berbagai persuasi politik dan komposisi kelas dan ideologis, hingga bagian dari asosiasi masyarakat. Semua komponen tersebut merupakan usaha pertama untuk menyatukan organisasi perempuan dalam agenda feminis dan mengakui adanya perbedaan politik, namun sangar melarang upaya untuk menggagalkan usaha menuju pembangunan gerakan perempuan otonom (Valte, 1992). GABRIELA menghadapi tantangan dalam mempertajam dan memperdalam isu-isu feminis karena dianggap bertentangan dalam mengintegrasikan isu-isu perempuan ke dalam perspektif politiknya. Keanggotaan GABRIELA mulai berkurang ketika beberapa anggota mempertanyakan bagaimana koalisi dikelola. Dari 41 anggota organisasi ini, setidaknya setengah dari anggota memutuskan untuk pergi dan hanya beranggotakan kaum demokrat nasional. Awalnya GABRIELA dianggap sebagai koalisi kekuatan sejati perempuan, kemudian menjadi berkurang hanya karena asosiasi organisasi lain yang dipengaruhi oleh kecenderungan ideologis. Namun saat ini GABRIELA disebut sebagai *Women Network GABRIELA* dengan kelompok daftar partai yang disebut *Gabriela Women Party* (Partai Wanita Gabriela).

Dengan digulingkannya presiden diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1986 dan pemulihan demokrasi di bawah kepemimpinan Corazon Aquino, organisasi masyarakat sipil dan partai politik non-tradisional berkembang. Aktivis politik memutuskan untuk mendirikan organisasi non-pemerintah (LSM) atau badan pembangunan sosial sebagai perpanjangan dari komitmen mereka terhadap

demokrasi di sektor pembangunan. Pada saat yang sama, kelompok perempuan diuntungkan oleh popularitas Corazon Aquino, yang menarik sejumlah besar dana asing dan lokal digunakan untuk proyek pembangunan. Menjelang akhir tahun 80-an, banyak organisasi wanita muncul dan mengambil isu-isu spesifik berdasarkan (Evangelista, 2017) :

1. Adanya kebutuhan untuk menerjemahkan pemahaman teoritis feminis ke dalam tindakan-tindakan yang konkrit.
2. Pendekatan fokus-masalah yang merupakan sebuah kebutuhan untuk menekankan masalah-masalah feminis, kekerasan seksual / pemerkosaan, hak reproduksi, seksualitas, reformasi legislatif untuk perempuan - isu-isu yang biasanya dianggap sosial sebagai masalah internasional.
3. Kepentingan untuk menangani masalah gender juga mendorong sejumlah kelompok perempuan untuk menyiapkan program dalam menangani masalah ini, didukung oleh deklarasi Dasawarsa Perempuan PBB pada tahun 1995, dan dengan menghadiri Konferensi Beijing pada tahun 1985 secara besar-besaran.

Pada tahun 1990, *Canadian International Development Agency* (CIDA), salah satu agen asing pertama yang mengarahkan bantuan ke LSM Filipina, memutuskan membentuk dana untuk *Women in Development* (WID). Setelah satu tahun melakukan diskusi dan negosiasi, diputuskan bahwa Forum Perempuan (kemudian diubah menjadi jaringan formal *WID Fund with the Group of 10 (G-10), another women's network* (WAND)). Usaha bersama ini dilembagakan di bawah yayasan yang disebut *Women's Alternative and Transformative Action* atau DIWATA.

Pada periode yang sama, pendukung feminis mengalami masa sulit dan mulai melakukan seminar sensitivitas gender reguler untuk masyarakat, sekolah, kantor pemerintah, dan LSM yang meningkatkan kesadaran akan isu-isu perempuan dan hak-hak perempuan. Pada awal tahun 90-an, beberapa perguruan tinggi dan universitas telah membentuk studi perempuan. Sementara itu, pemerintah nasional mengadopsi pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk

membuat birokrasi responsif gender, yang menyebabkan sejumlah akademisi feminis dan advokat hak-hak perempuan menjadi konsultan program pemerintah untuk pengarusutamaan gender.

Juga pada tahun 1987, *National Commission on the Role of Filipino Women*(NCRFW), mengadakan berbagai lokakarya konsultasi di antara berbagai kelompok perempuan yang menghasilkan rancangan *Phillipine Development Plan of Women*(PDPW) 1989-1992, yang menjadi volume pendamping untuk *Medium-Term Philippine Development Plan* (MTPDP) 1987-1992. PDPW berfungsi untuk mengintegrasikan perempuan dalam proses pembangunan. Kemudian dalam MTPDP (Wanita, yang merupakan setengah dari populasi bangsa, harus dimobilisasi secara efektif). Ekonomi dan Pembangunan Nasional (*National Economic and Development Authority / NEDA*) memberikan dukungan penting tidak hanya dalam mengintegrasikan bagian PDPW ke dalam pembaruan MTPDP 1990-1992, namun juga memasukkan NCRFW di berbagai sub komite perencanaan pembangunan dan juga untuk mengarusutamakan *Country Program for Women* melalui berbagai mekanisme yang memperluas akses terhadap sumber daya (Komisi Nasional Peranan Wanita Filipina, 2016).

Perhatian yang berkembang untuk memperbaiki kondisi perempuan selama pemerintahan Aquino mengakibatkan diberlakukannya undang-undang penting, yang ditunjukkan pada:

Tabel 2.1 Kemenangan Legislatif, 1989-Juni 1992

Tahun	Republic Act	Deskripsi
1989	6725	Undang-Undang Penguatan Larangan Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Menghormati Syarat dan Ketentuan Ketenagakerjaan
	6949	Undang-Undang yang Menyatakan Bahwa Setiap 8 Maret adalah Hari Libur Khusus atau Hari Perempuan Nasional
		Hukum Mempelai Wanita yang Melarang Pernikahan

1990	6955	Wanita Filipina dengan Warga Negara Asing yang Berbasis Pesanan Melalui Pos
	6972	Total Pembangunan dan Tindak Perlindungan Anak Mengamankan Pendirian Penitipan Anak pada Tiap Barangay
1991	7160	Kode Pemerintah Daerah tahun 1991 yang memperkenalkan mekanisme partisipasi perempuan di tingkat pemerintah daerah

Perlu ditekankan bahwa Undang-Undang Republik 7192 atau *Women in Development and Nation-Building Act* tahun 1992 memberikan dasar hukum untuk kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan. Hal ini secara khusus mengamankan perumusan *Phillipine Plan for Gender-Responsive Development* (PPGD) 1995-2025. Dirancang untuk melanjutkan prakarsa di bawah PDPW, PPGD memberikan strategi pembangunan yang akan memandu investasi dan pengeluaran pemerintah, dan meletakkan dasar bagi pembentukan *Gender and Development*(GAD) untuk menangani ketidaksetaraan gender di dalam birokrasi dan dalam berbagai program pemerintah dan jasa.

Periode setelah penggulingan diktator tersebut menunjukkan bagaimana feminis menemukan ruang artikulasi dengan masyarakat menengah maupun sipil. Dengan demikian, demokratisasi politik tentang feminis juga berusaha menekan batas demokrasi liberal patriarkal. Organisasi feminis berkembang dan menjadi lebih produktif saat mereka tidak lagi terhalang oleh gerakan Kiri yang dominan yang memprioritaskan agenda berbasis nasional dan kelas. Transisi pasca-Marcos memungkinkan kaum feminis untuk menyesuaikan aktivisme mereka dari gerakan lain dan memberi mereka ruang untuk tindakan yang lebih kreatif dan inovatif.

Sementara disisi lain masih ada beberapa kelompok yang terus menggunakan konsep kelas dan etnik sebagai alat analisis utama untuk memahami manifestasi dan reproduksi patriarki, terutama para feminis muda, mereka mengeksplorasi isu-isu lain yang sama pentingnya seperti politik seksual

dan identitas, dan prasasti seksisme dalam bahasa, komunikasi, wacana, dan pengetahuan (Sobritchea, 2000). Memang, gerakan feminis telah berevolusi, namun warisan sejarah (baik politik maupun ideologis) dan respons kontemporer para aktivis feminis terus menghasilkan ketegangan yang mencegah kesatuan strategis kelompok-kelompok feminis utama sebagai keuntungan substantif telah dibuat.

2.4 Perempuan Filipina pada Masa Pemerintahan Presiden Ramos (1992) sampai Sekarang

Perempuan dalam posisi kekuasaan atau struktur pengambilan keputusan tetap penting dalam memajukan pemberdayaan perempuan, sejauh ini PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk mendapatkan partisipasi perempuan yang setara dalam badan-badan pembuat keputusan. Namun, kerangka kerja patriarki politik dan pemerintahan yang dominan telah menyulitkan perempuan untuk menegaskan diri mereka di pusat kekuasaan seperti negara, pengadilan hukum, kongres, dan bahkan pemerintah daerah.

Secara global, kesenjangan gender dalam kepemimpinan politik tetap tinggi, PBB melaporkan bahwa hanya 22,8% dari seluruh anggota parlemen nasional di dunia adalah perempuan. Selain itu, hanya 10 wanita yang menjabat sebagai kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa secara global, pria terus mendominasi politik (Firmalo-Fabic, 2016). Untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut, Filipina telah melakukannya dengan cukup baik. Untuk masyarakat yang berkembang, beragama Katolik, dan patriarkal, Filipina melampaui ekspektasi ketika berada di peringkat 7 dalam *Global Gap Index* yang mengukur faktor-faktor seperti kesetaraan gender, kesehatan, peluang ekonomi dan politik, serta pemberdayaan politik. Analisis angka-angka ini terkait dengan laporan kesenjangan gender global sebelumnya, yang memiliki kesimpulan bahwa kesenjangan tersebut akhirnya ditutup dalam rentang 82 tahun (World Economic Forum, 2015).

Filipina memilih bukan satu, tapi dua presiden perempuan dalam rentang waktu kurang dari 20 tahun. Yang pertama adalah Corazon "Cory"

CojuangAquino, yang dipasang pada tahun 1986 setelah pemilihan cepat yang dilakukan oleh diktator Ferdinand Marcos, Sr. Cory Aquino, senator anti-Marcos Benigno Aquino Jr., berhasil mencalonkan diri sebagai presiden setelah permohonan untuk menentang diktator tersebut dengan mengumpulkan sejuta tanda tangan dari masyarakat seluruh Filipina. Yang kedua adalah Gloria Macapagal Arroyo, seorang mantan senator dan wakil presiden, ia merupakan putri Mantan Presiden Diosdado Macapagal. Secara kebetulan, kedua wanita tersebut dicalonkan melalui kekuatan masyarakat.

Meskipun gerakan perempuan menghasilkan keuntungan tertentu selama masa kepresidenan tersebut, namun yang terjadi dilapangan tidaklah seperti itu. Meskipun pada masa kepresidenan Aquino, ruang terbuka bagi gerakan perempuan untuk tumbuh dan memungkinkan partisipasi progresif perempuan di berbagai lapisan masyarakat, namun hal tersebut tetap berada di jalur konservatif jika itu sehubungan dengan hak reproduksi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Arroyo.

Dari tahun 1998 sampai 2013, Filipina menunjukkan peningkatan terus menerus dari pejabat yang terpilih yaitu 16,15% pada tahun 1998 menjadi 19,92% pada tahun 2013 (lihat Tabel 2 di bawah). Dianggap sebagai indikator yang baik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di negara ini, dua dari lima kandidat presiden dalam pemilihan 2016 adalah perempuan. Legislator perempuan adalah kursi di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipegang oleh mantan presiden tersebut. Namun, perempuan tertinggal dalam posisi elektoral pemerintah daerah, yang menduduki tidak lebih dari 20% -25%.

Tabel 2.2 Persentase Pejabat yang Dipilih di Filipina

Tahun Pemilu	Perempuan	Laki-Laki
1998	16.15	83.85
2004	16.63	83.37
2010	18.56	81.44
2013	19.92	79.75

Dalam dinas sipil, kesenjangan tersebut menyempit di birokrasi, Komisi Perempuan Filipina melaporkan bahwa 42% dari posisi ketiga (eksekutif senior) di pemerintahan ditempati oleh perempuan. Di sisi lain, dalam bidang pengadilan Presiden Benigno Simeon Aquino III menunjuk wanita pertama sebagai Hakim Agung (Maria Lourdes Sereno), wanita pertama sebagai *Ombudsman* (Conchita Carpio-Morales), dan wanita pertama yang memimpin *Justice of the Sandiganbayan* (*Amparo Cabotaje-Tang*) selama masa jabatannya di tahun 2010-2016.⁵

Harus ditekankan bahwa pemilihan pemimpin perempuan pada umumnya sesuai dengan hambatan yang ditimbulkan oleh politik dinasti dan patronase yang menjadi ciri sistem Filipina. Hampir semua yang menduduki posisi tertinggi di pemerintahan adalah perempuan. Meskipun para perempuan ini cenderung menyukai kebijakan konservatif, beberapa diantaranya justru menunjukkan tanda bahwa mereka bisa menjadi juara dalam legislasi pro-perempuan, yang seringkali bekerja dengan rekan-rekan progresif mereka demi memajukan advokasi.⁶

Dalam Kongres Filipina, misalnya, RUU Kesehatan Reproduksi pertama diajukan dan dipertahankan di Dewan Perwakilan Rakyat oleh legislator perempuan kelas atas yang berasal dari dinasti politik pada tingkat provinsi seperti Bella Angara-Castillo, Lualhati Antonino dan Malou Acosta, bersama dengan progresif legislator perempuan seperti Loretta Ann "Etta" Rosales dan Ana Theresia "Risa" Hontiveros dari Partai Akbayan. Mereka melaju dan maju dengan cepat pada pemilihan umum 2016 dengan mengesankan dan perempuan-perempuan ini membuat suara perempuan progresif menjadi terwakilkan.

Lebih dari satu dekade setelah Revolusi Kekuatan Rakyat, upaya para aktivis untuk mendorong reformasi pemilihan mengakibatkan berlakunya Undang-Undang Republik 7941 atau Undang-undang Partai tahun 1998, dimana undang-undang tersebut yang mengalokasikan 20% dari jumlah total kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk sektor organisasi yang terpinggirkan dan kurang

⁵ Ombudsman adalah seorang pejabat atau badan yang bertugas menyelidiki berbagai keluhan masyarakat.

⁶ Patronase adalah pendistribusian berbagai sumberdaya yang berharga: pensiun, lisensi atau kontak publik, berdasarkan kriteria politik.

terwakili. Terlepas dari keterbatasan hukum, sistem daftar partai memungkinkan organisasi perempuan untuk mewakili konstituen mereka di Kongres. PILIPINA dan GABRIELA menciptakan organisasi daftar partai masing-masing, yaitu Abanse! Pinay dan Gabriela Women's Party. Abanse! Pinay memiliki dua syarat kongres dan berhasil mengesahkan undang-undang kunci seperti Undang-Undang Orang Tua Tunggal tahun 2000, dan Undang-Undang Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Abanse! Pinay juga bersekutu dengan partai kiri demokratis yang didirikan pada tahun 1997, yaitu Akbayan. Saat Abanse! Pinay gagal menang dalam pemilihan 2004, Akbayan melanjutkan tugas pengarusutamaan gender dalam pembuatan kebijakan. Platform Akbayan tentang isu-isu perempuan menyebabkan terjadinya sesuatu yang penting seperti RUU Kesehatan Reproduksi, *Magna Carta of Women*, dan *Gender Balance Bill* (Congress of the Philippines, 2010). Demikian pula, Akbayan tetap menjadi satu-satunya partai politik di negara tersebut yang memaksakan jatah gender pada kepemimpinan partai, majelis, dan kongres (Elumbre, 2010: 219).

Untuk urusan buruh terjadi pengorganisasian besar-besaran di serikat pekerja perempuan, terutama di industri garmen, yang sudah berlangsung sejak tahun 70-an. Meskipun demikian, ketika organisasi perempuan berkembang setelah jatuhnya kediktatoran Marcos, terjadi pula lonjakan pembentukan komite perempuan di serikat pekerja. Perkembangan ini muncul dari berbagai keadaan dan dengan berbagai motivasi, seperti advokasi yang kuat dari pekerja perempuan terorganisir dan mendapat dukungan dari gerakan perempuan yang mendesak serikat pekerja untuk menangani isu-isu perempuan, tekanan dari gerakan buruh internasional yang meminta semua afiliasi untuk menempatkan kesetaraan gender dalam agendanya, serta dukungan dari LSM lokal dan internasional untuk membantu meningkatkan kesadaran akan isu gender (Hega, 2009).

Di bidang advokasi legislatif, anggota serikat pekerja perempuan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berlakunya Undang-undang Republik 7877 atau Undang-undang Pelecehan Seksual 1995. Undang-undang ini terus mempengaruhi kode etik tempat kerja dan advokasi serikat pekerja untuk memperbaiki jangkauannya. Dalam mengorganisir strategi kebutuhan untuk

memperjelas kesetaraan gender, gerakan buruh berkontribusi dalam pembentukan *Manggagawang Kababaihang Mithi ay Paglaya* (MAKALAYA) pada tahun 1998, yang dimulai sebagai forum pekerja perempuan (Comission Phillipine on Women, 2014). Anggota pendiri MAKALAYA adalah anggota serikat pekerja wanita dan perempuan dari organisasi pekerja informal berbasis masyarakat yang merupakan produk sampingan dari Program Pendidikan dan Penelitian Ketenagakerjaan. Semua organisasi perempuan ini didirikan untuk menanggapi kebutuhan untuk mengeksplorasi strategi pengorganisasian melalui cara tradisional serikat buruh. Menantang struktur serikat buruh yang didominasi laki-laki dan hubungan kekuasaan yang tidak setara dalam gerakan tersebut, MAKALAYA membentuk perlawanan operasional, budaya dan ideologis dari kebanyakan pemimpin serikat pekerja laki-laki.

Selama 30 tahun terakhir, perempuan Filipina telah berjuang demi kepentingan mereka dalam bidang legislatif, terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kontrol perempuan serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan perempuan tetap hidup bahkan selama tahun-tahun. GABRIELA dan organisasi afiliasinya terus berkembang bahkan pada saat organisasi massa lainnya dari kalangan demokrat nasional menyusut. Ketika organisasi lama merosot atau mengalami perpecahan dalam bidang hukum, para perempuan membentuk organisasi feminis baru. Perkembangan organisasi independen yang bekerja dalam berbagai isu menggambarkan paradigma gerakan sosial antiglobalisasi. Kaum feminis mulai berpuluh-puluh tahun yang lalu membangun koalisi mengenai berbagai isu mulai dari reformasi hukum, kesehatan dan hak reproduksi, pelacuran dan perdagangan manusia, migrasi, dan lain-lain. Meskipun tidak mengabaikan pertumbuhan gerakan sosial lainnya seperti gerakan lingkungan atau masyarakat adat, gerakan feminis merupakan keragaman dan cakupannya tetap sangat nyata.

BAB 3. PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER DI FILIPINA

Kesetaraan gender adalah dasar dari hak asasi manusia dan kondisi yang diperlukan untuk penghapusan kemiskinan dan pencapaian pembangunan sosial ekonomi nasional. Prinsip hak asasi manusia menuntut hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama bagi semua individu. Di Filipina dan di seluruh dunia, ada pengakuan yang berkembang bahwa pembangunan dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dicapai tanpa akses yang setara oleh semua kelompok untuk pengambilan keputusan, perencanaan, partisipasi politik, pendidikan, dan sumber daya produktif.

Untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, Filipina mengadopsi nilai-nilai internasional yang memang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan Komitmen Internasional oleh pemerintah Filipina dalam menjalankan program kesetaraan gender di negaranya. Komitmen Internasional tersebut diantaranya: CEDAW, *Beijing Platform for Action*, *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* (PCW, 2016).

CEDAW merupakan suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, atau lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Lundgren, 2017). Konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka dalam semua bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi juga mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan merubah praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotipe untuk perempuan dan laki-laki.

Sebelum CEDAW mulai diberlakukan pada tanggal 3 September 1981, Filipina telah menandatangani pada 15 Juli 1980 dan meratifikasinya pada

tanggal 5 Agustus 1981, Filipina merupakan negara ASEAN pertama yang melakukannya. Filipina juga meratifikasi Protokol Opsional untuk CEDAW pada 12 November 2003.

CEDAW telah berkontribusi besar dalam kemajuan dan pemberdayaan perempuan Filipina. Salah satunya yaitu pemberlakuan Undang-Undang Republik (*Republic Act*) 9710, atau dikenal sebagai *Magna Carta of Women* yang merupakan undang-undang hak asasi manusia perempuan yang komprehensif yang berusaha untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan mengakui, melindungi, memenuhi dan mempromosikan hak-hak perempuan Filipina, terutama mereka yang berada di sektor terpinggirkan.

Kemudian komitmen Internasional yang kedua yaitu *Beijing Platform for Action* (BPfA). BPfA adalah dokumen yang dihasilkan dari Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan di Beijing, Cina pada tahun 1995 yang diadopsi dalam konsensus oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selama Konferensi ini pemerintah Filipina dan PBB sepakat untuk mempromosikan pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk memastikan bahwa perspektif gender tercermin dalam semua kebijakan dan program di tingkat nasional, regional dan internasional. BPfA mewakili komitmen komunitas internasional terhadap promosi kesejahteraan perempuan dan bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Strategi Nairobi ke depan untuk Kemajuan Perempuan.⁷

Beijing Platform for Action (BPfA, 1995) telah dilaksanakan dalam kerangka Rencana Filipina 30 Tahun untuk Pembangunan Responsif Gender. BPfA termasuk perjanjian untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, memberantas kemiskinan, mengadopsi langkah-langkah untuk menempatkan perempuan di posisi-posisi kunci dan memberikan rekomendasi mengenai pekerjaan yang tidak digaji. BPfA juga mengakui hak-hak perempuan untuk mengontrol seksualitas dan reproduksi mereka (jumlah anak yang ingin mereka miliki) (Ramos, 2006). BPfA mempertimbangkan situasi konflik bersenjata serta akar ras dan etnis yang mempengaruhi kesetaraan gender.

⁷ Strategi Nairobi diadopsi oleh Konferensi Dunia untuk meninjau dan menilai pencapaian Dekade PBB untuk Perempuan: Kesetaraan, Pembangunan dan Perdamaian, yang diadakan di Nairobi, Kenya, 15-26 Juli 1985.

Komitmen Internasional ketiga yaitu *ASEAN Committe on Women* (AWC). AWC merupakan koordinasi dan pemantauan terhadap prioritas regional dan kerjasama regional ASEAN dalam isu-isu dan kepedulian perempuan yang direalisasikan dalam *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* (ACWC), diresmikan selama KTT ASEAN ke-16 yang diadakan di Ha Noi, Vietnam pada tanggal 07 April 2010. Filipina, melalui Departemen Kesejahteraan Sosial Pembangunan dan Komisi Perempuan Filipina (sebelumnya dikenal sebagai Komisi Nasional untuk Peran Perempuan Filipina) secara aktif berpartisipasi dalam pembentukan ACWC. Hal tersebut dilakukan karena bertujuan untuk menegakkan, mempromosikan, melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental perempuan dan anak-anak di ASEAN.

Filipina, sebagai negara anggota ASEAN telah mengadopsi cita-cita ACW bersama dengan perjanjian internasional lainnya tentang perempuan yang telah diikutinya. Dalam hampir satu dekade keberadaan ACW, Filipina telah secara aktif berpartisipasi dalam urusannya dan telah menyalurkan upaya menuju pencapaian tujuan-tujuan Komite.

Selama Pertemuan ACW pada bulan November 2010, delegasi Filipina menyoroti pencapaian Filipina dalam hal pengarusutamaan gender melalui pemberlakuan undang-undang untuk perlindungan, promosi dan pemenuhan hak asasi perempuan, kebijakan eksekutif tentang *Gender and Development* (GAD) anggaran, Audit GAD dan Kode GAD lokal, tata kelola yang responsif gender, pemberdayaan ekonomi perempuan dan mekanisme lainnya.

Kemudian Komitmen Internasional terakhir yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Seperti yang telah kita ketahui SDGs adalah program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB. SDGs juga merupakan program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. SDGs merupakan komitmen yang paling berpengaruh terhadap pembangunan kesetaraan gender di Filipina.

Program SDGs yang diterapkan Filipina berfokus pada mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang meliputi (1) rasio yang seimbang antara anak perempuan dan anak laki-laki dalam pendidikan dasar, menengah dan tinggi, (2) bagian perempuan dalam pekerjaan berupah di sektor non-pertanian, dan (3) proporsi kursi yang dipegang oleh perempuan di parlemen nasional (United Nations, 2006). Dengan demikian, mengatasi isu-isu gender di segala aspek berarti secara efektif berkontribusi terhadap pencapaian SDGs.

Menghasilkan wanita yang setara dengan hak atas sumber daya ekonomi seperti tanah dan properti adalah target penting untuk mewujudkan tujuan ini. Begitu juga memastikan akses universal untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Saat ini ada lebih banyak perempuan yang bekerja di kantor pemerintah daripada kantor swasta, mendorong para pemimpin perempuan untuk terus maju, dengan begitu akan membantu memperkuat kebijakan dan legislasi untuk kesetaraan gender yang lebih besar.

Untuk mewujudkan kesetaraan sesuai SDGs, Pemerintah Filipina dalam tingkat lokal mewujudkannya dengan melakukan berbagai program. Seperti yang kita ketahui, pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Filipina telah mencapai terobosan besar dalam beberapa dekade terakhir. Undang-undang, kebijakan, dan program gender yang responsif serta mekanisme kelembagaan mampu menghasilkan lembaga pemerintah nasional, sedangkan unit pemerintah daerah merupakan hasil dari advokasi berkelanjutan pemerintah dan mitranya dalam pembuatan undang-undang, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi. Dimasukkannya target dan strategi terkait gender dalam Rencana Pembangunan Filipina 2011-2016 yang diartikulasikan dalam Kontrak Sosial Presiden Benigno Aquino menanamkan dorongan tambahan dan upaya nasional untuk menangani isu-isu gender dalam program-program pemerintah.

Pemberdayaan Perempuan, Pembangunan dan Kesetaraan Gender 2011-2016 merupakan salah satu rencana yang berfokus pada gender yang dirumuskan oleh Filipina sejak tahun 1989; rencana pertama adalah Rencana Pembangunan Perempuan Filipina atau *Philippine Development Plan for Women* (PDPW 1989-

1992), Rencana Pembangunan Responsif-Gender Filipina atau *Philippine Plan for Gender- Responsive Development* (PPGD 1995 - 2025), dan Kerangka Rencana untuk Perempuan atau *Framework Plan for Women* (FPW 2004-2010). Laporan tentang implementasi rencana-rencana ini menunjukkan bahwa banyak masalah gender mampu ditangani.

Perumusan Rencana Tenaga Perempuan (*Women Edge Plan*) memberikan kesempatan yang tepat untuk meninjau isu-isu gender yang muncul dan mempertimbangkannya dalam rencana pemerintah yang ada (National Commission on the Role of Filipino Women, 1980). Program ini juga merupakan tempat yang tepat untuk mengkonkretkan ketentuan *Philippine Development Plan* (PDP) yang responsif terhadap gender dan mengaplikasikannya ke dalam strategi dan program untuk mengatasi isu-isu gender. Sebagai program pendamping PDP, Rencana Tenaga Perempuan akan memandu lembaga dalam mengarusutamakan dimensi gender untuk program reguler mereka, serta dalam melaksanakan kegiatan yang berfokus pada gender. Pemantauan pelaksanaan program ini juga melalui proses perencanaan dan anggaran gender terhadap pembangunan tahunan atau *annual Gender and Development* (GAD) yang diharapkan dapat menghasilkan dasar yang lebih kuat untuk menilai sejauh mana pemerintah memantau pelaksanaan Kontrak Sosial Presiden (*President's Social Contract*) No. 13.⁸

Perumusan Rencana Tenaga Perempuan dipimpin oleh Komisi Perempuan Filipina atau *Philippine Commission on Women* (PCW). Komisi perempuan ini merupakan hasil dari berbagai konsultasi dan sesi validasi dengan perwakilan komite perencanaan dari pemerintah, organisasi nonpemerintah, dan akademisi. Perwakilan dari unit pemerintah lokal juga mengambil bagian dalam memvalidasi rencana ini, terutama dalam memastikan bahwa itu selaras dengan situasi aktual di lapangan. PCW juga akan melanjutkan bantuan teknis, advokasi, dan pemantauan untuk memandu upaya pengarusutamaan gender untuk memenuhi hak asasi

⁸*Presiden Sosial Contract No.13* merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang gender dan pemberdayaan perempuan di Filipina.

perempuan dan menyelesaikan komitmen Presiden terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Program Rencana Tenaga Perempuan terdiri dari lima bagian utama atau bidang sasaran strategis yang telah diidentifikasi berdasarkan prioritas *Magna Carta of Women* (MCW), PPGD 1995–2025, dan komitmen pemerintah kepada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). Bidang-bidang utama ini diperinci dalam bagian-bagian yang berbeda. Pembangunan gender tersebut dilakukan dalam berbagai aspek, diantaranya;

1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
2. Penetapan Hak Pembangunan Sosial Perempuan
3. Gender dalam Keamanan, Keadilan, dan Perdamaian
4. Gender dalam Lingkungan Hidup
5. Pemerintahan yang Responsif Terhadap Gender

Selain menjelaskan bagian dari program diatas, mekanisme implementasi pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pemerintah untuk memandu para pengemban tugas dalam memastikan bahwa ketentuan-ketentuan program tersebut dilaksanakan, dan hasil yang diinginkan tercapai pada akhir periode program dan bersifat berkelanjutan.

3.1 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Sebagian besar literatur tentang pemberdayaan ekonomi untuk pekerjaan yang memerlukan upah, merupakan faktor kunci dalam membuat masyarakat yang terlibat aktif menghasilkan output yang konsisten. Pemberdayaan ekonomi juga mengarah pada pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Di Filipina, sangat disayangkan karena sempat terjadi tragedi "pertumbuhan pengangguran" yang telah menghambat upaya pembangkitan tenaga kerja pemerintah. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, Rencana Pembangunan Filipina 2013-2016 mengupayakan tenaga kerja dan pekerjaan sebagai sektor penting yang dapat secara berkelanjutan mengatasi ketimpangan dan ketidaksetaraan serta membawa pertumbuhan yang inklusif. Dengan tujuan ini, kelompok Rencana Tenaga Perempuan berusaha untuk memberikan input penting pada kondisi sektor-sektor

kerja formal saat ini, seperti pekerja migran, ekonomi informal dan UMKM, serta pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kapasitas dari sektor-sektor tersebut memberikan perempuan akses terhadap pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan mampu melindungi perempuan dan hak-hak mereka, yang akan membuat pemberdayaan ekonomi benar-benar inklusif.

Langkah awal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, pemerintah Filipina mewujudkannya dengan mengubah Kode Buruh Filipina, yang berfungsi sebagai referensi kebijakan utama dari Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan atau *Department of Labor and Employment* (DOLE). Departemen ini mengutip kesetaraan gender, nondiskriminasi (Pasal 135, sebagaimana diubah menjadi RA 6725 (Suatu Undang-Undang yang Memperkuat Larangan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Menghargai Syarat dan Ketentuan Pekerjaan), dan ketentuan lain yang mengatur kerja perempuan (Pasal 132 hingga 138) . Pencabutan Pasal 130–131 dari Kode Tenaga Kerja menjadi RA 10151 (Undang-undang yang Membiarkan Pekerjaan dilakukan Hingga Malam) secara total mengangkat larangan kerja malam pada perempuan, sehingga memberikan kontribusi kesempatan yang sama dan perlakuan yang baik terhadap perempuan dalam pekerjaan.

Pemberdayaan ekonomi perempuan mengacu pada perempuan yang memiliki akses dan kontrol atas sumber daya produktif bernilai tinggi, seperti informasi, kredit, pinjaman atau bantuan keuangan, pelatihan layanan, pasar dan teknologi, serta peningkatan kontrol atas lingkungan bisnis. Dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, perempuan memiliki pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi, sambil menikmati manfaat dari peluang tersebut untuk menciptakan kekayaan yang setara dengan laki-laki.

Pemberdayaan perempuan bekerja untuk meningkatkan tingkat partisipasi yang akan memungkinkan perempuan untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan dan perspektif mereka sendiri. Sebagaimana hasil yang diharapkan dari proses kemitraan bersama untuk pemberdayaan perempuan, perempuan (1) mendapatkan akses yang meningkat ke program dan layanan ekonomi dan / atau yang berhubungan dengan perusahaan, (2) layanan dukungan yang lebih baik

untuk usaha ekonomi dan usaha perempuan, (3) kurangnya kendala pada perempuan sebagai akibat dari peran dan harapan yang responsif gender, dan (4) perempuan memperoleh dapatan yang lebih baik, kemampuan yang diperluas dan peluang hidup.

Salah satu bentuk dari pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan pemerintah Filipina melalui Komisi Perempuan Filipina yaitu berupa *GREAT Women Project: Innovating Governance for Women's Empowerment Results of the Partnership Between the PCW-GREAT Women Project and the Municipality of Sta. Cruz in Davao del Sur* (Proyek Wanita Hebat: Inovasi Tata Kelola untuk Pemberdayaan Perempuan Hasil Kemitraan Antara Proyek Wanita PCW-GREAT dan Kotamadya Sta. Cruz di Davao del Sur) (Phillipine Commission on Women, 2016).

Sta. Cruz adalah kota industri kelas pertama di Davao del Sur, dengan 15.581 rumah tangga atau sekitar 77.827 orang. Kotamadya itu terletak di Metropolitan Davao. Didirikan pada tahun 1884, Sta. Cruz adalah kotamadya tertua di provinsi ini. Sta. Cruz terletak di utara Davao del Sur. Sta. Cruz dibatasi oleh Kota Davao di utara dan Kota Digos di selatan. Luas lahannya adalah 27.960 hektar, mewakili 6,7% dari total luas daratan Davao del Sur. Lahan hutan terdiri lebih dari 60% dari luas lahan. Sta. Cruz memiliki 18 barangay, dengan Sibulan menempati area daratan terbesar dan Poblacion Zone III sebagai area terkecil.

Sta. Cruz memiliki pertanian, perikanan dan sumber daya mineral. Tanaman pertanian utama termasuk kelapa, pisang, tebu, jagung, kopi dan sayuran. Kotamadya juga menghasilkan buah-buahan bernilai tinggi seperti mangga, lanzones dan durian. Ternak adalah produk terkemuka. Produk pertanian utama di Sta. Cruz adalah budidaya pisang, kelapa, tebu dan rumput laut untuk pasar lokal dan ekspor. Pohon cemara tropis, kayu, rotan dan bambu menutupi area hutan dan hutan yang luas di Sta. Cruz. Memiliki garis pantai sepanjang 24 kilometer yang mendukung budidaya dan penangkapan ikan. Sumber daya mineralnya terdiri dari bijih belerang, batuan fosfat, guano, batu gamping dan bahan baku semen.

Transportasi udara dan air dapat diakses di daerah melalui pelabuhan udara dan laut internasional yang terletak di Kota Davao dan General Santos City. Perjalanan darat difasilitasi oleh Sta. Terminal Transportasi Cruz Overland. Dan Jalan raya nasional yang beraspal dibangun di sepanjang Sta. Cruz menghubungkan Kota Davao dan General Santos dan provinsi yang berdekatan.

Pada tahun 2008, *Phillipine Commission on Women (PCW)*, memiliki Pengarahan Proyek untuk memperkenalkan *GREAT Women Project* kepada Pemerintah Provinsi Davao del Sur. *GREAT Women Project* di Davao del Sur dipilih melalui kriteria yang ditetapkan: yaitu potensi tinggi untuk pengembangan (yaitu aksesibilitas, sumber daya manusia dan alam, dan pasar), perempuan dalam berbisnis (yaitu, perusahaan wanita dan persentase wanita yang tinggi dalam perusahaan, Unit Pemerintahan Lokal (*Local Government Unite/LGU*) yang mendukung GAD (*Gender and Development*), kedamaian dan ketertiban, kemiskinan, proyek atau program lain yang berhubungan dengan daya serap LGU. Gubernur Provinsi juga menetapkan kriteria provinsi dalam pemilihan mitra kotamadya. Davao del Sur mempertimbangkan lokasi geografis dari kotamadya yang dapat dikelompokkan, termasuk kota-kota yang secara politik selaras dengan pejabat lokal.

Data dasar tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Pada tahun 2010, ada 56 kelompok yang dipimpin perempuan di Sta, Cruz. Hampir setengah perusahaan mikro yang dipimpin perempuan masuk ke dalam manufaktur makanan, produksi kerajinan tangan, penjual makanan dan produk pertanian, serta pemeliharaan hewan. Sebagian besar kegiatan tersebut berbasis rumahan dan dioperasikan melalui kepemilikan pribadi.

Implementasi rencana kerja pertama. Rencana kerja pertama dimulai pada Februari 2009, ketika nota kesepahaman pertama ditandatangani. Rencana kerja pertama difokuskan pada tinjauan LGU dilakukan untuk meningkatkan program dan kegiatan kotamadya, sementara mendapatkan pengembangan kapasitas pada GAD dan WEE (*Women Economics Empowerment*) untuk pejabat lokal dan kepala departemen. Anggaran untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan pekerja perempuan tidak ditetapkan di beberapa departemen LGU

saja (yaitu, Kantor Perencanaan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota) melainkan di semua departemen LGU. Pengembangan kapasitas pada penggunaan alat analisis gender juga mengembangkan pemahaman yang lebih konkret tentang proyek yang dilakukan oleh anggota kelompok kerja teknis.

Sta. Cruz menyebutkan beberapa masalah yang dihadapi dalam pekerjaan pertama mereka dan perencanaan keuangan. Kantor Kota GAD memikul tanggung jawab untuk melaksanakan proyek. GAD fokus terhadap individu yang dibebani dengan banyak tanggung jawab, dan tidak bisa hanya fokus pada pelaksanaan rencana kerja. LGU awalnya menemukan proses perencanaan kerja yang membosankan dan membingungkan, tanpa koordinator area lokal untuk tinggal dengan proyek tersebut. Rekrutmen anggota kelompok kerja teknis membutuhkan seleksi yang lebih hati-hati.

Implementasi rencana kerja kedua. Rencana kerja kedua melanjutkan pengembangan kapasitas kelompok kerja teknis untuk membuat rencana program dan kegiatan terlaksana. Fokusnya juga pada penguatan organisasi wirausaha perempuan dan meningkatkan kualitas perempuan. Bentuk dari rencana kerja kedua adalah:

- *Capacity Development of WMEs* (Pengembangan Kapasitas untuk Manajer Ekonomi). Sepuluh manajer ekonomi dan konselor bisnis dari Sta. Cruz berkemampuan untuk menyusun rencana tindakan dalam menyediakan konsultasi bisnis dan konseling bisnis untuk perempuan pengusaha mikro. Termasuk Kantor Manajemen Perusahaan Ekonomi Lokal, tokoh penting, Ketua Dewan Gender dan Pembangunan Kota dan pemimpin perempuan dari kelompok perusahaan.
- Pelatihan Pengembangan Usaha. Sekitar 30 anggota kelompok kerja teknis dilatih tentang pengembangan usaha untuk memungkinkan mereka mengidentifikasi intervensi dan proyek dari Pemberdayaan Ekonomi Perempuan untuk rencana investasi tahunan.
- Pengembangan Kapasitas Pengusaha Mikro Perempuan. Perempuan pengusaha mikro dilatih tentang pengembangan organisasi dan pembentukan nilai untuk memperkuat kelompok perusahaan yang mereka

dirikan. Pengusaha mikro perempuan lainnya menerima pelatihan teknis tentang pengembangan produk, pengemasan dan pelabelan untuk WME (*Women Micro Entrepreneurs*), di mana WME mengembangkan produk sampel baru dengan kemasan yang ditingkatkan. Kelompok perempuan pengusaha mikro, khususnya Asosiasi Deboners Tagabuli, menjadi sasaran orientasi keselamatan, kesehatan kerja dan kunjungan dari DOLE.

- Konsultasi antara mitra NGA (*National Government Agency*), WME dan LGU diadakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pengembangan kemitraan di WEE. Rencana kemitraan antara Departemen Sains dan Teknologi, Departemen Perdagangan dan Industri, Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan, Pemerintah Daerah Kota, dan perempuan pengusaha mikro yang sekarang ada dan sedang dilaksanakan.
- Kelompok kerja teknis kota (*Municipal Technical Working Group/MTWG*), bersama dengan perempuan pengusaha mikro, melanjutkan kunjungan belajar ke Kota Tagum dan Kota Panabo untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan perempuan yang sukses dalam hal menenun dan pembuatan kerajinan tangan. MTWG belajar pentingnya mekanisme dan sistem yang dipasang di LGU untuk mendukung proyek-proyek yang dilakukan perempuan.
- *GREAT Women Project* mencetuskan minat dan keinginan LGU serta perempuan pengusaha mikro untuk mengejar WEE dimulai dengan Kode GAD. Dengan Kode GAD, Sta. Cruz mampu meningkatkan anggaran GAD-nya dengan alokasi WEE naik dari Php.5 juta menjadi Php. 13 juta pada tahun 2013, dan mendirikan Kantor Pusat GAD (MGADO). MGADO adalah sekretariat dan komite manajemen Dewan Kota GAD (*Municipal GAD Office/MGADC*) dan bertugas untuk mengawasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek-proyek, program dan layanan WEE terkait dengan rencana GAD dan proposal proyek untuk perempuan pengusaha mikro. MGADC telah melembagakan penggunaan alat analisis gender untuk mencapai tujuan ini.

- Manajemen Perusahaan Ekonomi Lokal, yang terdiri dari konselor bisnis yang secara rutin mengunjungi WME untuk konseling bisnis dan organisasi, dibuat dan diberi wewenang. Pemerintah kota dapat memperluas pengembangan kapasitas yang terkait WEE ke departemen LGU dan lembaga mitra lainnya. Pemerintah Kota Sta. Cruz juga memanfaatkan Anggaran GAD untuk mengejar pembangunan pusat produktivitas.

Bentuk dari rencana kerja perempuan tersebut direalisasikan pada Mei 2013, dimana Sta. Cruz menandatangani rencana kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi dari *Tagabuli Deboners Association* dan *Bato Mat Weavers' Association*. Rencana kemitraan ini dikategorikan ke dalam (1) penguatan organisasi, (2) kapitalisasi perempuan pengusaha mikro dan (3) pengembangan proyek atau produk.

Rencana kemitraan ini bertujuan untuk membantu kelompok perempuan pengusaha mikro untuk mempertahankan usaha mereka dan memperluas lini produk mereka untuk menghasilkan pendapatan yang nantinya akan diberikan kepada anggota kelompok. Rencana kemitraan awalnya dikembangkan melalui serangkaian kunjungan di tempat dan penilaian kelompok WME. Temuan-temuan dipresentasikan selama pertemuan konsultasi dari agen-agen mitra, DOST (*Department of Science and Technology*), DTI (*Department of Trade and Industry*), DOLE (*Department of Labor and Employment*), LGU (*Local Government Unit*) dan WME (*Women Micro Entrepreneur*). Dengan bimbingan koordinator area lokal, agensi mitra melakukan pertukaran pikiran mengenai kemungkinan intervensi untuk perempuan pengusaha mikro dan akhirnya merumuskan rencana kemitraan untuk WEE.

Komitmen untuk Asosiasi Debitur Tagabuli (*Tagabuli Deboners Association/TADEAS*) dibuat dan saat ini sedang dilaksanakan. Perempuan pengusaha mikro mendaftarkan kelompok mereka melalui DOLE. Pemerintah Daerah Kota Sta. Cruz memperpanjang dukungan modal sebesar Php.50,000 untuk TADEAS, sambil mempersiapkan pembangunan area pemrosesan. Lahan

untuk area pemrosesan sedang disiapkan untuk konstruksi bangunan oleh BLGU. DOST menyediakan sarana untuk tata letak dan desain area pemrosesan, sementara pelatihan tentang praktik manufaktur yang baik dan keamanan pangan dilakukan secara bertahap. PESO memberikan bantuan teknis tentang pendaftaran dan manajemen bisnis TADEAS.

DTI bermitra dengan Biro Perikanan dan Sumberdaya Perairan (BFAR) untuk memasarkan produk-produk TADEAS, yang menghasilkan pesanan tambahan dan mendorong peningkatan volume produksi. Melatih pengembangan organisasi, manajemen keuangan dan pemasaran adalah masukan DTI untuk grup ini. DOLE menyiapkan proposal proyek untuk mendapatkan bantuan keuangan melalui Program Pengembangan Mata Pencarian berbasis masyarakat. Dengan persetujuan proposal oleh DTI dan DOLE, kedua lembaga akan menambah modal, peralatan dan bahan untuk TADEAS.

Pada tahun yang sama, Sta. Cruz mengalokasikan dana melalui program PESO untuk menanamkan modal kecil bebas bunga untuk perusahaan yang dipimpin perempuan. WMEs bisa mendapatkan pinjaman individu sebesar Php 2.000-Php 5.000 sementara pinjaman kelompok WME berkisar dari Php 5.000-Php 10.000.

Tibolo Tribal Women of Sta. Cruz menempati lima hektar lahan yang dibeli LGU di Tibolo, Gunung Apo. DOT (*Departemen of Transformation*) menyediakan dana untuk pembangunan pusat pelatihan, kamar dan peralatan catering untuk pengusaha perempuan. DOST dan DTI memberikan pelatihan keterampilan tentang praktik-praktik manufaktur yang baik dan pengembangan produk tas abaca dan pekerjaan manik para suku perempuan. DOLE juga memberi modal memulai layanan catering perempuan di area tersebut.

Kemudian wujud dari pemberdayaan ekonomi perempuan yaitu Rencana Kemitraan untuk Asosiasi Penenun Bato Mat (*Partnership Plan for the Bato Mat Weavers' Association*). Komitmen kepada Asosiasi Penenun Bato Mat juga mendapatkan daya tarik. Asosiasi Penenun Bato Mat melakukan reorganisasi dan telah menyelesaikan inventarisasi keanggotaan. LGU membantu proses tersebut dengan menyumbangkan tanah untuk pembangunan area produksi dan pusat

pemasaran. Sta. Cruz LGU menjanjikan dukungan modal sebesar Php.50,000 kepada setiap kelompok. DOST melakukan pelatihan tentang pencelupan dan kombinasi warna sintetis untuk Penenun Bato Mat dan kelompok WME lainnya. DTI telah melatih para pemimpin perempuan dalam persiapan keuangan. DOLE menyiapkan proposal proyek untuk memperoleh bantuan keuangan melalui Program Pengembangan Mata Pencaharian berbasis masyarakat dan pelatihan produksi. Dengan persetujuan proposal oleh DTI dan DOLE, kedua agensi akan memperluas modal, peralatan dan material untuk Asosiasi Penenun Bato Mat.

Mitra Deboners 'Association memungkinkan kelompok wanita untuk mendapatkan area lahan untuk pemrosesan dan input bisnis lainnya, LGU menyumbangkan tanah untuk area pengolahan tersebut. Sta. Cruz mengalokasikan Php.150,000 untuk pembangunan gedung dan Php.50,000 untuk dukungan modal kepada kelompok perempuan. DTI, DOST dan DOLE menyediakan input pengembangan produk, termasuk modal dan peralatan.

Sta. Cruz membantu memasarkan produk wanita dengan membantu perempuan berpartisipasi dalam pameran dagang dan menempatkan produk perempuan di Pusat Pasalubong Kota. Keterampilan pemasaran ditingkatkan dengan manajemen bisnis, pemasaran dan masukan pelatihan keuangan dari DTI. Melalui partisipasi WME yang dipilih dalam Seri Klinik Desain Intensif, lebih banyak desain diproduksi terutama di antara produk abaca. Perempuan pengusaha mikro mampu membiayai produk mereka dengan nilai yang tinggi dan memasuki pasar baru dengan menjadi bagian dari GREAT Women.

Dengan demikian, Filipina membuktikan bahwa negaranya mampu mengatasi masalah gender dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan melakukan perbaikan yang diawali dengan mengembangkan potensi kota yang paling banyak memiliki sumber daya seperti Sta. Cruz, kemudian merambat ke kota lain dan berhasil mewujudkan terciptanya kesetaraan gender yang cukup merata.

3.2 Penetapan Hak Pembangunan Sosial Perempuan

Sejarah telah membuktikan peran aktif yang dimainkan perempuan di Filipina dalam mempercepat kemajuan material dan spiritual masyarakat. Ada perbedaan yang signifikan dalam status perempuan antar negara mengingat kerangka budaya yang cukup berakar. Di sisi lain, kesamaan mendasar menyatukan perempuan dalam penderitaan terhadap perbedaan di mana pun mereka berada - dalam status hukum, ekonomi, sosial politik, dan budaya perempuan.

Di Filipina, perempuan membentuk sebagian besar tenaga kerja pertanian untuk persiapan, pengolahan dan pemasaran komoditas pertanian. Perempuan merupakan sumber ekonomi yang substansial, namun status mereka di sektor ini masih kurang menguntungkan. Umumnya, strategi yang ada untuk memperbaiki situasi perempuan cenderung menekankan peran mereka sebagai istri, ibu, pengasuhan anak dan ibu rumah tangga (memasak, mengumpulkan bahan bakar, mengambil air, membersihkan rumah, mengelola keuangan keluarga dll.). Ada semakin banyak bukti yang menunjukkan peran perempuan yang lebih luas, dimana perempuan mampu memainkan peran penting dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi. Hal tersebut juga menimbulkan kecenderungan dalam menunjukkan partisipasi perempuan Filipina pada angkatan kerja yang semakin meningkat dan substansial yaitu, dalam perikanan, pertanian, organisasi masyarakat, dll. Saat ini, sebagian besar wanita terlibat dalam kegiatan seperti, pengumpulan ikan, pemasaran ikan, perbaikan alat tangkap, pra-panen, kegiatan pasca panen, produksi ikan, pengolahan ikan, pengawetan, penanganan dan pengepakan. Terlepas dari semua itu, masih ada perempuan dan gadis-gadis muda di Filipina yang berpenghasilan rendah. Salah satunya kemiskinan, kemiskinan tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan jika tidak ditangani dengan serius. Masalah kemiskinan pada umumnya akan menyebabkan kondisi kesehatan menurun, gizi buruk, tingkat pendidikan rendah, pendapatan terbatas dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Bentuk dari penetapan pembangunan sosial perempuan di Filipina, pemerintah mewujudkannya melalui sektor Perikanan. Sumber daya perikanan

Filipina terdiri dari perairan pedalaman, pesisir dan lepas pantai. Filipina menyatakan komitmennya yang kuat untuk mempromosikan manajemen yang efektif untuk mencapai konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan dari stok ikan yang bermigrasi di Samudera Pasifik barat dan tengah (*Western and Central Pacific Ocean/WCPO*) sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, PBB *Fish Stocks Agreement*, dan Konvensi WCPF (*Western and Central Pasific Fishier Commision*). Dalam memberlakukan ketentuan Konvensi WCPF, Filipina menjunjung tinggi langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikembangkan oleh Komisi, termasuk CMM 2016-01 terkini tentang konservasi dan pengelolaan berbagai macam tuna seperti: *bigeye*, *yellowfin* dan *skipjack* di WCPO.

Fokus dari sektor Perikanan ini yaitu perempuan didaerah pesisir, karena Filipina seluruhnya dikelilingi oleh lautan, maka potensi yang diwujudkan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah dengan memberdayakan perempuan pesisir (istri dan anak nelayan.) Perempuan disini tidak terjun langsung dalam penangkapan ataupun berlayar dilaut lepas, tetapi perempuan disini memiliki peran terhadap pengelolaan ikan seperti penimbangan, pemasaran dan keuangan. Meskipun kebanyakan dari perempuan Filipina memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dari laki-laki namun untuk urusan pengelolaan hasil perikanan ini, perempuan Filipina memiliki kemampuan yang sangat baik.

Meski perempuan tidak terlibat langsung didalamnya, namun perempuan disini memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan negara khususnya dalam sektor perikanan. Selain keterampilan yang telah disebutkan diatas, perempuan pesisir Filipina juga membentuk komunitas Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (*Community-based Coastal Resources Management/CBCRM*). Komunitas ini menyediakan berbagai pelatihan dan penyediaan keterampilan yang dikhususkan untuk perempuan dalam mengelola sumber daya perikanan. Misalnya bagaimana cara menjual ikan yang benar, pelatihan kepemimpinan, dan pembagian tugas yang seimbang (karena perempuan disini memiliki peran sebagai pengurus rumah tangga yang merangkap sebagai pengelola hasil perikanan).

Hal ini terbukti dengan Filipina masih merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Lebih dari 1,6 juta orang Filipina bergantung pada industri perikanan untuk mata pencaharian mereka. Filipina juga dianggap sebagai penghasil tuna utama di Samudera Pasifik Barat dan Tengah (WCPO). Kontribusi industri perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara pada tahun 2015 adalah 1,5% dan 1,7% pada harga saat ini dan konstan, masing-masing (Perikanan Filipina Profil, 2015). Juga pada tahun 2015, kinerja perdagangan luar negeri dari industri perikanan memberikan surplus bersih 511 juta dolar. Dengan nilai ekspor total 943 juta dolar AS dan nilai impor 432 juta dolar AS.

3.3 Gender dalam Keamanan, Keadilan dan Perdamaian

Setiap negara pasti memiliki masalah dalam mengatasi perlindungan dan akses terhadap kebutuhan keadilan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender, seperti perdagangan manusia, pelacuran, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya harus menjadi tujuan terpenting dari masyarakat mana pun. Saat ini, hukum dan lembaga yang mendiskriminasi perempuan terus ada, menghambat realisasi penuh hak-hak mereka dalam pencapaian kesetaraan gender. Maka dari itu perludanya reformasi legislatif dan kebijakan yang jelas.

Untuk menangani berbagai masalah gender diatas, pemerintah Filipina melakukan upaya-upaya seperti memberikan akses keadilan, pemulihan hukum, dan perlindungan. Selain itu, peningkatan kepekaan dan pengembangan kapasitas, melembagakan mekanisme pemantauan, dan menetapkan prosedur, standar, serta fasilitas yang responsif gender juga dapat membantu mengurangi masalah terhadap gender. Misalnya, fasilitas perlindungan perempuan dan anak telah dibuat dan dioperasionalkan dalam barangay, lembaga penegak hukum, dan rumah sakit.

Kemudian pemerintah juga menyidakan akses untuk perawatan dan dukungan kesehatan maupun psikososial(PCW, 2016). Layanan langsung dari wujud diskriminasi gender dilaksanakan melalui Dewan Antar-Lembaga Anti Kekerasan Perempuan dan Anak-Anak (*Inter-Agency Council on Violence*

Against Women and Their Children/IACVAWC) dan Dewan Antar-Badan Antii Perdagangan Manusia (*Inter-Agency Council Against Trafficking/IACAT*) yang menerapkan standar dan mekanisme pemantauan untuk operasi, termasuk penanganan, pemulihan, dan reintegrasi korban yang selamat dari perdagangan.

DSWD (*Democratic Socialist Women of the Philipines*) mengembangkan teknologi sosial yang disebut Layanan Konseling untuk Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pilottested di Wilayah V, VIII, dan X dan berakhir pada tahun 2012, proyek CSRPDV adalah tanggapan Departemen terhadap mandat Undang-undang Anti-VAWC tahun 2004 untuk mengembangkan dan memberikan konseling dan pengobatan rehabilitasi kepada pelanggar. Hal ini merupakan proyek berbasis komunitas yang bertujuan untuk merehabilitasi para pelaku kekerasan dan membantu mereka dalam reintegrasi ke keluarga dan komunitas mereka.

Akses yang terakhir yaitu berupa dukungan untuk kemandirian ekonomi dan mata pencaharian. Pemerintah, melalui DSWD, LGU, dan LSM menyediakan layanan dan menerapkan program dukungan mata pencaharian dan pelatihan keterampilan bagi perempuan miskin korban kekerasan dan perdagangan.

Selain itu, Perempuan Filipina memperoleh jaminan hukum untuk memilih atau dipilih dimulai sejak tahun 1935. Di bawah Konstitusi tahun 1987, status perempuan mengalami perubahan dramatis. Di dalam konstitusi itu status perempuan dalam pembangunan nasional diakui secara tegas. Konstitusi tahun 1987 mengharuskan adanya wakil-wakil rakyat dari daftar partai serta mengharuskan adanya alokasi kursi bagi perempuan.

Filipina bisa dikatakan berhasil menjadi salah satu negara yang demokratis yaitu salah satunya ditandai dengan keterwakilan perempuan dalam politik. Pada tahun 2003, sekitar 24 anggota *Senate* terdapat tiga orang perempuan, dari 216 anggota *House of Representatives* ada 38 orang perempuan. Di DPRD, dari 727 orang anggota ada 120 orang perempuan sedangkan di jabatan eksekutif, dari 24 orang anggota kabinet ada empat orang perempuan, dari 74 orang gubernur ada 15 orang perempuan, dan dari 1.635 wali kota ada 241 orang perempuan.

Besarnya jumlah perempuan pada posisi-posisi strategis di ketiga lembaga negara merupakan indikasi majunya partisipasi politik perempuan di Filipina. Secara umum partisipasi politik masyarakat Filipina terlihat saat pemilihan umum, baik pemilihan walikota, anggota perwakilan daerah maupun pusat, gubernur dan presiden. Partisipasi politiknya juga terlihat dalam kegiatan pengawasan kerja eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kelompok masyarakat yang aktif melakukan pengawasan terdiri dari kelompok buruh, petani, pemuda, perempuan, guru dan gereja. Perwakilannya ada juga di lembaga legislatif, sementara ada yang mengelompokkan diri di dalam LSM.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran gerakan perempuan dan LSM yang terdapat di Filipina, antara lain *Pilipina*, salah satu LSM perempuan di Filipina yang berdiri pada tahun 1981, dan *Democratic Socialist Women of the Philippines* (DSWP) (IUCN, 2014). Meski di Filipina tidak ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, pemerintah membentuk Komisi Nasional Peran Perempuan Filipina (*The National Commission on the Role of Filipino Women, NCRFW*) pada tanggal 7 January 1975. Komisi ini bertugas member advis kepada presiden, dan membantu kabinet dalam kebijakan dan program dalam upaya memajukan perempuan. Intervensi-intervensi utamanya dalam bidang kebijakan seperti menyalurkan legislasi, khususnya undang-undang antipemerkosaan, mempengaruhi agenda legislatif agar lebih responsif terhadap gender, serta memprioritaskan agenda legislatif untuk perempuan. Sementara yang ditujukan kepada masyarakat secara luas yakni meningkatkan tingkat kepedulian *Gender and Development* (GAD), yaitu merupakan pembangunan yang berbasis gender untuk memajukan kaum perempuan. Mekanismenya berjalan dengan cara mengorganisir kelompok legislatif baik dalam Kongres maupun LSM perempuan.

Walaupun jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah, akan tetapi gerakan perempuan ini berusaha untuk memperbaiki kondisi perempuan di Filipina. Gerakan perempuan tersebut dimulai dari lingkup yang terkecil hingga lingkup yang paling luas dan terus merembet ke dunia publik. Baik dalam bidang

keluarga, pendidikan, ekonomi, sampai pada bidang politik dan pembuat kebijakan (*decision maker*).

3.4 Gender dalam Lingkungan Hidup

Keadaan lingkungan saat ini merupakan konsekuensi langsung dari faktor ekonomi dan sosial. Yang paling menentukan dari faktor-faktor ini adalah kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan pengerusakan hutan dan polusi air dan udara (PCW, 2016c). Diperkirakan bahwa peran perempuan sangat penting dalam memerangii kemiskinan dan mengendalikan penduduk agar bekerja untuk perlindungan lingkungan dan sumber daya alam dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Meskipun perempuan juga dapat menjadi agen degradasi lingkungan melalui berbagai kegiatan dan tanggung jawab mereka, perempuan juga memiliki dampak yang sama pentingnya terhadap pelestarian lingkungan karena peran ganda mereka. Kegiatan sehari-hari perempuan seperti bercocok tanam, mengumpulkan atau membeli makanan, merawat hewan peliharaan, mengumpulkan kayu dan air, merawat anak-anak dan melakukan pekerjaan rumah telah memberi mereka pengetahuan khusus tentang lingkungan.

Perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi respon sensitif gender. Terdapat empat bidang yang telah diidentifikasi sebagai pilar penting dalam menghadapi perubahan iklim: mitigasi, adaptasi, transfer teknologi dan pendanaan. Dua pilar pertama terkait dengan manifestasi perubahan iklim; dan dua pilar terakhir terkait dengan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan. Mitigasi mencakup proses membatasi emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, misalnya emisi dari bahan bakar fosil serta perusakan hutan, dengan maksud untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang aman. Adaptasi mencakup berbagai kegiatan untuk mengurangi kerentanan dan membangun ketahanan pada sektor-sektor utama, seperti air, pertanian dan pemukiman. Teknologi yang baru dan ditingkatkan serta inisiatif pembiayaan di semua tingkatan juga perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya kolektif untuk mengatasi perubahan iklim.

Usaha mitigasi dan adaptasi harus memperhatikan secara sistematis dan efektif dampak spesifik gender dari perubahan iklim di bidang, antara lain, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; keanekaragaman hayati; air; kesehatan; hak asasi manusia; dan perdamaian serta keamanan.

Mekanisme pembiayaan harus cukup fleksibel untuk mencerminkan prioritas dan kebutuhan perempuan. Partisipasi aktif perempuan dalam pengembangan kriteria pendanaan dan alokasi sumber daya untuk inisiatif perubahan iklim sangat penting, terutama di tingkat lokal. Analisis gender dari semua lini anggaran dan instrumen keuangan untuk perubahan iklim diperlukan untuk memastikan investasi yang sensitif gender dalam program-program untuk adaptasi, mitigasi, transfer teknologi dan pendanaan.

Konsultasi dan partisipasi perempuan dalam inisiatif perubahan iklim harus dijamin, serta peran kelompok dan jaringan perempuan harus diperkuat. Saat ini perempuan kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan pada tata kelola lingkungan. Mereka harus sama-sama terwakili dalam struktur pengambilan keputusan untuk memungkinkan mereka memberikan pandangan dan keahlian mereka yang unik dan berharga terhadap perubahan iklim. Perempuan dapat memberikan kontribusi substantif melalui pengetahuan dan pengalaman mereka tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, perempuan dalam posisi kepemimpinan di tingkat nasional, daerah dan kelompok masyarakat telah menunjukkan perbedaan dalam menanggulangi bencana alam, baik dalam usaha penyelamatan dan evakuasi darurat serta rekonstruksi pasca-bencana, sama halnya sebagaimana dalam pengelolaan sumber daya alam yang penting, seperti air tawar.

Keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan di seluruh sektor lingkungan di Filipina menunjukkan komitmen dan kemajuan menuju kesetaraan dan kesinambungan.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh perempuan di Provinsi Sorsogon, Filipina (Guiriba, 2013). Perempuan merupakan informan kunci karena berpartisipasi dan terlibat dalam perlindungan lingkungan dan kerja konservasi. Secara umum, sifat keterlibatan perempuan adalah pada teknis advokasi,

kebijakan, konseptualisasi proposal proyek, perencanaan dan perancangan program serta mengawasi pelaksanaan proyek dari program lingkungan yang dilakukan. Sebagian besar perempuan ini aktif berpartisipasi dalam penanaman pohon, reboisasi hutan bakau, pembersihan pesisir, pemilahan limbah dan pengelolaan limbah padat.

Kelompok perempuan perdesaan mewakili tingkat pertama kerangka kerja kelembagaan yang diperlukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan dari bawah ke atas (Peralta, 2008). Dimana perempuan memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan sumber pengetahuan tradisional, hal ini merupakan faktor penting untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dengan begitu kerangka kerja lingkungan yang diharapkan berjalan dari bawah ke atas benar-benar terwujud.

3.5 Pemerintah yang Responsif Terhadap Gender

Pemerintahan merupakan pelaksana otoritas ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan. Ini terdiri dari mekanisme, proses dan institusi, di mana warga dan kelompok mengartikulasikan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka dan menengahi perbedaan mereka (UNDP, 1997). Untuk mengatakan bahwa tata kelola telah dilakukan dengan baik, UNDP lebih lanjut menyatakan bahwa hal itu harus dilakukan dengan cara "partisipatif, transparan, bertanggung jawab, efektif, adil, mempromosikan supremasi hukum, menunjukkan prioritas yang jelas dan membuat keputusan berdasarkan konsensus yang luas, terutama kekhawatiran terhadap masyarakat miskin yang paling rentan di masyarakat; dan merumuskan visi strategis untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan."

The Philippine Framework Plan for Women (Rencana Kerangka Kerja Filipina untuk Perempuan) menggambarkan tata pemerintahan yang baik yang responsif gender sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan

perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.

Salah satu contoh dari praktik pemerintah Filipina yang responsif gender adalah seperti yang dilakukan di kota Davao, Filipina (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 2017). Dari populasi Kota Davao sebesar 1,15 juta pada tahun 2002, lebih dari setengahnya adalah perempuan. Rasio gender adalah 75 perempuan dari 100 laki-laki. Dengan jumlah mereka yang sangat banyak, wanita berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan kota.

Pergolakan politik selama 20 tahun kekuasaan Presiden Marcos yang kuat sangat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran perempuan dalam masyarakat dan isu-isu perempuan. Perjuangan melawan kediktatoran menciptakan gerakan perempuan yang kuat di Kota Davao. Pada saat Marcos jatuh dari kekuasaan, banyak kelompok perempuan telah ditempatkan dengan kuat untuk mengejar advokasi hak-hak dan kesejahteraan perempuan melalui pengarusutamaan gender. Pada tahun 1986, dua perempuan ditunjuk sebagai anggota dewan kota, yang merupakan hal pertama dalam sejarah kota. Akhir 1980-an juga melihat lebih banyak upaya menuju pemberdayaan perempuan melalui pengorganisasian paling dasar, pelatihan paralegal, dan pengakuan atas hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia.⁹

Awal 1990-an adalah saat untuk memajukan agenda perempuan. Kelompok-kelompok wanita bekerja untuk merumuskan langkah-langkah legislatif, mencari perwakilan sektoral, membentuk kelompok-kelompok belajar untuk menyusun Kode Perempuan, melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin mengenai situasi perempuan, dan memilih lebih banyak perempuan di dewan kota.

Akhir 1990-an dan awal 2000-an melihat berkembangnya upaya pengarusutamaan gender dan pembangunan. Pada bulan September 1997 dewan

⁹ Pelatihan Paralegal adalah pelatihan atau pengalaman kerja yang dimiliki seseorang di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara. Definsi ini menyatakan bahwa tanggungjawab hukum untuk pekerjaan paralegal bersandar langsung di bawah pengacara.

kota mengesahkan *Women's Development Code*. Tahun berikutnya, Walikota Benyamin de Guzman mengeluarkan Perintah Eksekutif No. 24 yang menyetujui peraturan dan pelaksanaan undang-undang. Diantara bagian undang-undang tersebut, terdapat pembentukan Divisi Gender dan Pengembangan Terpadu dibawah pemerintah kota untuk mengawasi penerapan undang-undang dan bertindak sebagai badan koordinatif, pengaturan dan pemantauan.

Tindakan pengarusutamaan GAD lainnya termasuk pembuatan Pusat Medis Davao dan Badan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pusat Medis Davao mendirikan *Women and Children Protection Unit* (WCPU), pusat intervensi krisis keluarga satu atap, dan program *Rumah Birthing* untuk mempromosikan kehamilan yang sehat melalui program yang berkualitas.

Lembaga-lembaga lain yang disiapkan untuk menangani isu-isu perempuan adalah Pusat Pengasuhan Anak, pusat penitipan anak untuk karyawan LGU. *Bathaluman Crisis Center Foundation*, sebuah LSM yang memberikan layanan langsung kepada perempuan korban kekerasan dan diskriminasi lainnya, selain itu LSM tersebut juga menyediakan pusat rehabilitasi untuk tindak pemerkosaan, pelecehan anak, dan kekerasan terhadap perempuan.

Ditingkat barangay, pengarusutamaan GAD mengambil bentuk *Gender Sensitivity Training* (GST) dan Perencanaan Kebijakan Gender, di mana anggota dewan, petugas kesehatan, ahli gizi, polisi, dan pemimpin dari 37 barangay berpartisipasi dalam KTT Wanita, selain itu majelis konsultasi organisasi wanita barangay dan organisasi sektoral mengadakan perumusan agenda perempuan yang dilaksanakan setiap tahun.

Kota Davao saat ini telah jauh lebih maju daripada kota yang lain dalam pengarusutamaan GAD. Hal pertama yang dilakukan adalah mengatur kode pengembangan terhadap perempuan. Kota Davao juga memiliki mekanisme untuk memilih wakil perempuan pada dewan kota. Selain itu Kota Davao juga memiliki kantor tetap, yang diresmikan oleh hukum, dan didedikasikan untuk pengarusutamaan GAD. Semua itu merupakan bentuk pelaksanaan amanat dari dana publik untuk program GAD (setidaknya 6% dari dana pengembangan pertanian, 30% dari dana bantuan pembangunan resmi, dan 5% dari dana umum).

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari BAB 1 hingga BAB 5 dapat disimpulkan bahwa Filipina sebagai negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara mampu menunjukkan pada dunia bahwa bisa mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan sangat baik. Adat patriarki yang melekat pada negara-negara di Asia Tenggara seakan tidak menjadi penghalang bagi Filipina untuk mewujudkan kesetaraan tersebut. Keberhasilan itu tak lepas dari komitmen yang kuat pemerintah Filipina untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan gender tersebut.

Selain kontribusi langsung pemerintah, gerakan-gerakan perempuan juga berpengaruh dalam mewujudkan kesetaraan tersebut. Pada awalnya gerakan perempuan Filipina muncul setelah lengsernya Presiden Aquino pada tahun 1987 dengan ditandai adanya perlawanan kaum feminis untuk mendapatkan haknya dan memperjuangkan cita-citanya. Gerakan perempuan Filipina merupakan gerakan nasional yang terorganisir yang terdiri dari LSM dan organisasi pekerja perempuan, perempuan pedesaan, perempuan pribumi, gadis, penyintas kekerasan terhadap perempuan; serta komite perempuan dalam suatu organisasi. Selama tiga dekade terakhir, gerakan perempuan telah memberikan layanan pada kesehatan seksual dan reproduksi serta korban kekerasan berbasis gender, memfasilitasi pengarusutamaan perspektif gender di pemerintah dan komunitas akademis, serta mencapai keuntungan signifikan di tingkat kebijakan untuk kemajuan hak-hak perempuan.

Gerakan perempuan juga telah berkolaborasi dengan gerakan sosial lainnya, dan telah mampu mengarusutamakan analisis feminis dalam berbagai isu politik. Hubungan antara feminis dan gerakan sosial yang berkaitan dengan isu kelas dan imperialisme mampu ditangani oleh kaum feminis yang mempertahankan bahwa pembebasan perempuan dari penindasan patriarkal tidak dapat terjadi tanpa adanya kebebasan dari berbagai bentuk imperialisme.

Selain yang disebutkan diatas, Filipina juga memegang teguh kepada komitmen Internasional untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen

tersebut antara lain CEDAW, *Beijing Platform for Action*, *ASEAN Committee on Women*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Keempat komitmen itu diadopsi dan diimplementasikan dalam bentuk lembaga yakni *Phillipine Commission on Women* (PCW). PCW menjadi lembaga tertinggi untuk urusan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Filipina, khususnya perempuan yang terpinggirkan. Selain PCW, *Republic Act 9170 – Magna Carta of Women* (MCW) merupakan implementasi dan bentuk komitmen Filipina terhadap CEDAW. MCW berisi undang-undang perlindungan perempuan dan anak-anak perempuan untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam segala bidang kehidupan.

Pada tahun 2016 WEF membantu membuktikan bahwa Filipina berhasil dalam praktik pembangunan gender di negaranya sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan WEF dan menunjukkan grafik yang bagus khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta kemampuan untuk bertahan hidup. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan kesetaraan gender di Filipina karena komitmen pemerintah yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan Filipina negara yang bebas diskriminasi gender dan tidak ada perlakuan berbeda yang diterima laki-laki dan perempuan, baik itu dalam lingkungan masyarakat maupun dimata hukum. Kesetaraan ini bukan berarti perempuan harus memiliki kedudukan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki. Tetapi peran laki-laki dan perempuan dilakukan sesuai dengan porsinya, dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan demikian, Filipina menjadi negara yang aman dihuni oleh semua kalangan (baik laki-laki maupun perempuan).

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Abinales, P. N. and Amoroso, D.J. 2005. *State and Society in the Philippines*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Acosta, P., T. Igarashi., R. Olfindo. dan J. Rutkowski. 2017. *Developing Socioemotional Skills for the Philippines' Labor Market*. Washington: The World Bank.

Abinales, P. N. and Amoroso, D.J. 2005. *State and Society in the Philippines*. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Asian Development Bank. 2013. *Gender Equality in the Labor Market in the Phillipine*. Januari. Mandaluyong: ADB.

Bakry, Suryadi umar.2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Departement of Labor and Employment. 2011. *The Phillipine Labor and Employment Plan 2011-2016: Inclusive Growth Trough Decent and Productive Work*. April. Manila: DOLE.

Gealogo, F. 2010. *Kasalanan sa Ikaanim na Utos: Katawan at Katauhan sa Diskurso ng mga Tekstong Historikal Noong ika-19 na Dantaon' in Navarro, Atoy and Jose, Dorothy (eds.), Kababaihan sa Kalinangan at Kasaysayang Pilipino*, Manila: C&E Publishing, Inc.

Ikbar,Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*.Bandung: PT. Refika Aditama.

Karl, Marilee. 1995. *Women and Empowerment: Participation and Decision Making*.London:Zed Books.

Rebecce Leonard, Martha Osorio, Mary Luz Menguita-Feranil. 2015. "Gender Opportunities and Constraints in Inclusive Business Models." Roma, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Sutrisno H. 1984. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tasil, Kaan. 2007. *A Conceptual Framework for Gender and Development Studies: From Welfare to Empowerment*. Wien: Institut für Institutionelle & Heterodoxe Ökonomie.

Terami-Wada M. 2014. *Sakdalistas' Struggle for Philippine Independence, 1930-1945*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Jurnal Ilmiah

Camagay, M.L. 1998. Kababaihan sa Rebolusyon. *Phillipine Journal of Third World Studies*. 14 (2): 56-77.

Guiriba, Glenton O. 2013. Ecofeminism: Women's Work on Environmental Conservation in Sorsogon Province, Phillipine. *The International Journal of Social Science*. 13 (1): 123-133.

Lanzona V. A. 2009. Capturing the Huk Amazons: Representing women warriors in the Philippines (1940s- 1950s). *Southeast Asia Research*. 17(2): 134-174.

Quindoza, L.S. 1996. Roots of Feminist thought in the Philippines. *Review of Women's Studies*. 6 (1): 159-172.

Parks, M. H., M. E. Christie., dan I. Bagares. 2015. Gender and Conservation Agriculture: Constraints and Opportunities in the Philippines. *GeoJournal* 80:61-77.

Stalker, Peter. 2008. Millenium Development Goal. *Nigerian Journal of Clinical Practice*. 14 (3): 21-31.

Laporan

Bhoola, Urmila. 2017. *Investing in Women-Phillipine Context Country*. Dalam Investing in Women or the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Africa Selatan: International Gender Equality and Human Rights Consultant.

Caparino, O.A. 2018. *Status of Agriculture Waste and About PhilMech Mandate*. Dalam 2018 International Forum on Sustainable Application of Waste-to-Energy in Asia Region. Munoz: PhilMech.

Castillo, Lourdes M. 2017. *Gender Equality Mainstreaming Towards Nation Building*. Dalam COA GAD Focal Point System. Filipina: Commission on Audit.

Estrada-Claudio, S. 2015. *Voices and Choices in Reproductive Rights: Scholarship and Activism*. In: *The Social Science in the Asian Century*. Agustus 2017. Friedrich Eberto Stiftung. Manila.

Evangelista, Meggan S. 2017. *Feminism and the Womens Movement in Phillipines*. Agustus 2017. Friedrich Eberto Stiftung. Manila.

Inter-Agency Council Against Trafficking. 2013. *The Philippine Guidelines on the Protection of the Rights of Trafficked Women*. Manila: PCW.

International Labor Organization. 2013. *Marking Progress Against Child Labor-Global Estimate and Trends 2000-2012*. Geneva: IPEC.

International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2014. *Women in Environmental Decision Making in the Philippines*. Washington: IUCN Global Gender Office.

Liou, Caroline. 2015. *Understanding Women's Participation in Forestry in the Philippines Key Messages*. Januari 2015. FAOUN. Bangkok.

Lundgren, Sara Souad. 2017. *Women Political Representation – a Study About*

Gender Equality in the Government. Manila: Kandidatuppsats Offentlig förvaltning.

National Commission on the Role of Filipino Women. 1980. *Women in the Philippines: Country Report 1980*. Manila: NCRFW.

Peralta, Athena. 2008. *A Case Study from the Philippines 1*. Editor: Tina Johnson. New York: 355 Lexington Avenue, 3rd Floor.

Philippine Commission on Women. 2013. *Addressing Gender and Enterprise Challenges of the Bamboo Craft Industry in Leyte Utilization of Gender-Responsive Addressing Gender and Enterprise Challenges of the Bamboo Cra Ft Industry in Leyte*. Januari. Filipina: GREAT Women Project.

Philippine Congress. 2005. *The Fight Against Violence on Women in the Phillipine: The GABRIELA Experience*. Agustus. Filipina: GABRIELA Organization.

Philippine Institute for Development Studies. 2017. *Policy Notes*. Juni. Filipina: *Analyzing Housework Through Family and Gender Perspectives*.

Philippine Legislators' Committee on Population and Development Foundation, Inc., and WomensHub. 2003. *Gender and ICT in Phillipine: A Proposed Policy Framework*. " 28 May 2003, 2003.

Report, Annual, National Action Plan, and Women Peace. 2017. Annual Report on the National Action Plan on Women Peace and Security. *Annual Report 2*: 0–54.

Republic Act Nomor 9710 tahun 2009. *The Magna Carta of Women: Implementing Rules and Regulations*. 1 April 2010. Phillipine Commission on Women. Manila.

Terami-Wada M. 2014. *Sakdalistas Struggle for Philippine Independence, 1930-1945*. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Tuazon, Ariel. 2017. *Gender and Development (GAD) Awareness in a Higher*. 6 Juni 2016. Manila: Officer.

United Nation. 2006. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women : Philippines*. US: UN Women.

United Nations. 2015. *Taking Stock of the Global Partnership for Development*. USA: UN.

Western and Central Pasific Fisheries Commission. 2017. *Information on Fisheries, Reseach, and Statistics*. Bagian 1. Rarotonga: Annual Report of the Commission.

Makalah Pidato Ilmiah

Kalla, M. Jusuf. 2015. Global Leaders Meeting on Gender Equality and Women Empowerment. *A Commitment to Action*. Newyork: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations. 27 September.

Website

Estrada-Claudio. 2005. The Women's Movement(s) and Social Movements: Conjectures and Divergences. <https://www.europe-solidaire.org/spip.php?ar?cle530>. [Diakses pada 2 Maret 2018]

Finance, Detik. 2006. Filipina Lunasi Hutang Ke IMF. 26 Desember 2006. 2006. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-725212/filipina-lunasi-utang-ke-imf>. [Diakses pada 12 Januari 2018]

Gaborro, A. 2009. Filipino Women Power . 1991. <http://babaylanfiles.com/2009/06/innews-filipino-women-power.html>. 2009.

Gabriela. 2012. Explanation of Vote on HB 4244 (RH Bill) GWP Rep. Emmie De Jesus. 2012. <http://gabriellawmensparty.net>. [Diakses pada 25 Maret 2018]

- Girls Not Brides. 2012. About Child Marriage. 2012. <https://www.girlsnotbrides.org/>. [Diakses pada 22 Januari 2018]
- Kintanar T. and David C. 1996). Salud Algabre, Revolutionary. Review of Women's Studies. 1996. <http://journals.upd.edu.ph/index.php/rws/article/view/3095/2912>. [Diakses pada 25 April 2018]
- Library of Congress, U.S. 1991. "THE ROLE AND STATUS WOMEN." 1991. <http://countrystudies.us/philippines/44.htm>. [Diakses pada 27 Maret 2018]
- Miller-Mullo, Layli. 2012. Tahirih Justice Center. 2012. <http://www.tahirih.org/>. [Diakses pada 22 Januari 2018]
- Organization, WHO World Health. 2012. "Gender, Equity and Human Rights." 2012. <http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/>. [Diakses pada 22 Februari 2018]
- Ramos, Med. 2006. Promoting Gender Equality in the Philippines. Phillipines. <http://www.ombudsman.gov.ph/UNDP4/promoting-gender-equality-in-the-philippines/index.html>. [Diakses pada 12 April 2018]
- Rights, Center for Reproductive. 2010. "Philippines Must Act on Magna Carta of Women." 25 Maret 2010. 2010. <https://www.reproductiverights.org/feature/philippines-must-act-on-magna-carta-of-women>. [Diakses pada 11 Januari 2018]
- Strother, Jason. 2013. "Persamaan Gender Semu di Filipina". 12 Oktober 2013. http://m.kbr.id/10-2013/persamaan_gender_semua_di_filipina/1756.html. [Diakses 27 Oktober 2017].
- Santos-Maranan, A., Perrena, N. and Fabros, A. 2007. Women's Political Participation in the Philippines. Conversations, reflections and Recommendations. <http://www.eldis.org/go/home&id=57724&type=Document#.WK8P.nRhh1E4>. [Diakses pada 05 Maret 2018].

Senate of the Philippines. 2017. Anti-Rape Act of 2016. 2017. https://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=17&q=SBN-1252/ [Diakses pada 27 Maret 2018].

Talitha, Ajeng. 2017. "Filipina Tempat Terbaik Dihuni Perempuan, Bagaimana dengan Indonesia?". <http://tandaseru.id/filipina-tempat-terbaik-bagaimana-dengan-indonesia/>. [Diakses pada 17 Mei 2018]

Valte, C. 1992. The Philippine Women's Movement: In Search of a Feminist Identity. <http://library.fes.de/fulltext/iez/00060006.html>. [Diakses pada 29 Maret 2018].

UN Women. 2017. About UN Women. <http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>. [Diakses pada 12 Januari 2017]

Widjojo, Noverica. 2013. Mengenal Lebih Jauh Pemanfaatan Panas Bumi Di Filipina. <https://www.wwf.or.id/?30064/Belajar-Mengenai-Pemanfaatan-Panas-Bumi-di-Filipina>. [Diakses pada 12 Februari 2018].

Women, Alliance of Filipino. 2008. GABRIELA. 2008. <http://www.gabrielaph.com/>. [Diakses pada 18 April 2018].

World Organization Against Torture. 2018. GABRIELA National Alliance of Women's Organizations in the Philippines, no. May 2018. <http://www.omct.org/network/asia-region/philippines/m150/%0sAGABRIELA>. [Diakses pada 23 Mei 2018].